ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERKAIT PEMBATALAN PEMUTUSAN PAKTA INTELIJEN *GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION AGREEMENT* DENGAN JEPANG PADA TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

IMRO'ATUL MUFIDAH

NIM. I72217042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

MEI 2021

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imro'atul Mufidah

NIM : I72217042

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* dengan Jepang pada Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 8 April 2021

yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

147C7AJX079523553

Imro'atul Mufidah

NIM. I72217042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Imro'atul Mufidah

NIM : I72217042

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul, **"Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* dengan Jepang pada Tahun 2019",** saya berpendapat bahwa skripsi sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 21 April 2021

Zaky Ismail, M.S.I.

PENGESAHAN

Skripsi oleh Imro'atul Mufidah dengan judul: **"Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* dengan Jepang pada Tahun 2019"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Zaky Ismail, M.S.I.	M. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198212302011011007	NIP 198401052011011008

Penguji III	Penguji IV
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.	Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NIP 198408232015031002	NUP 201409001

Surabaya, 27 Mei 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.

NIP 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imro'atul Mufidah

NIM : I72217042

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional

E-mail address : mielafida6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERKAIT PEMBATALAN PEMUTUSAN PAKTA INTELIJEN *GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION AGREEMENT* DENGAN JEPANG PADA TAHUN 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2021
Penulis

(Imro'atul Mufidah)

ABSTRACT

Imro'atul Mufidah, 2021, *Analysis of South Korean Foreign Policy Regarding the Cancellation in Terminating the Intelligence Pact of the General Security of Military Information Agreement with Japan in 2019, Thesis of the International Relations Study Program Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya*.

***Keywords: GSOMIA, South Korea, Japan, United States of America, Decision, National Security, Foreign Policy*.**

South Korea announced that it would terminate a treaty pact with Japan called the General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) in August 2019. However, South Korea changed its decision three months later in November 2019. The purpose of this research is to explain why South Korea chose to change its decision not to withdraw from the pact in 2019. The approach used by the author in compiling this research is qualitative with an explanatory type of research focus. In this research, the writer uses the concept of national security and theory of foreign policy by James N. Rosenau. The main reason why South Korea did not withdraw from the pact is because of the national security interests of the nuclear threat from North Korea. Besides that, there were also some other factors that encouraged South Korea to continue the pact with Japan in November 2019, which were individual, role, social, governmental, and systemic factors.

ABSTRAK

Imro'atul Mufidah, 2021, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen General Security of Military Information Agreement dengan Jepang pada Tahun 2019*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: GSOMIA, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Keputusan, Keamanan Nasional, Kebijakan Luar Negeri.

Korea Selatan telah mengumumkan untuk tidak melanjutkan sebuah pakta perjanjian dengan Jepang yang disebut dengan *General Security of Military Information Agreement* pada Agustus 2019. Namun, Korea Selatan merubah keputusannya tersebut tiga bulan kemudian pada November 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis fokus penelitian eksplanatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep keamanan nasional dan teori kebijakan luar negeri oleh James N. Rosenau. Hasil dari penelitian ini adalah alasan kepentingan keamanan nasional dari ancaman nuklir Korea Utara merupakan penyebab utama Korea Selatan tidak jadi menarik diri dari pakta. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Korea Selatan untuk tetap melanjutkan pakta dengan Jepang pada November 2019, yaitu faktor individu, peran, sosial, pemerintah dan sistemik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
MOTTO iv
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Argumentasi Utama 18
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KAJIAN TEORITIK 21
A. Konsep Keamanan Nasional 21
B. Teori Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau 24
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
C. Tingkat Analisis 34
D. Teknik Pengumpulan Data 36
E. Teknik Analisis Data 37
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data 38
G. Alur Penelitian 38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Urgensi *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) bagi Korea Selatan..... 44
B. Pemutusan Pakta GSOMIA oleh Korea Selatan..... 42
C. Alasan-Alasan Korea Selatan Tidak Jadi Menarik Diri dari Pakta GSOMIA dengan Jepang 50
a. Semenanjung Korea Secara Teknis Masih Berperang..... 50
b. Dinamika Ketegangan di Semenanjung Korea Tahun 2016-2019 .. 52
c. Nuklir Korea Utara Merupakan Ancaman Bersama bagi Korea Selatan dan Jepang 62
d. Hubungan Kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat 65
D. Konfirmasi Teoritik Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dengan Konsep Keamanan Nasional..... 70
E. Konfirmasi Teoritik Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dengan Teori Kebijakan Luar Negeri 74
BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan..... 99
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA..... 102
LAMPIRAN 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Majelis Nasional Korea Selatan 2016-2020 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pasal Pertama dan Kedua Pakta GSOMIA 42
Gambar 4.2. Patung Wanita di Depan Kedubes Jepang di Korea Selatan..... 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenanjung Korea merupakan salah satu kawasan yang paling bergejolak di dunia. Awalnya, Semenanjung Korea memiliki satu entitas politik yang sama sebelum akhirnya terbagi menjadi dua. Mundurnya Jepang dari penjajahannya selama 36 tahun di Semenanjung Korea pada Agustus 1945, membuat semenanjung tersebut terbagi menjadi dua, yang mana bagian utara dikendalikan oleh Uni Soviet dam bagian selatan dikendalikan oleh Amerika Serikat.[2] Pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet masih merupakan sekutu dan berkedudukan di sana untuk menentukan sistem yang akan dianut oleh Korea sebagai negara independen.

Namun, Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perselisihan mengenai sistem yang harus dianut di Korea, yang mana Amerika Serikat menginginkan agar Korea bersistemkan demokrasi, sedangkan Uni Soviet ingin menerapkan rezim komunis di Korea. Tak dapat terselesaikan, Korea pun akhirnya terbagi menjadi dua dengan bagian selatan yang menjadi *Republic of Korea* atau yang sekarang disebut Korea Selatan dan bagian utara menjadi *Democratic People's Republic of Korea* atau yang sekarang disebut Korea Utara.[3]

---

[2] Young Ick Lew, *Brief History of Korea*, (USA: The Korea Society, 2000), diakses pada 21 Oktober 2020, https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs_GeneralReading/BRIEF%20HISTORY%20OF%20KOREA.pdf.

[3] Ibid., halaman 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korea Selatan dan Korea Utara dibatasi oleh zona demiliterisasi[4], area perbatasan yang membagi Semenanjung Korea menjadi dua, yang meliputi garis 38 derajat lintang utara dan memiliki panjang 240 kilometer.[5] Zona demiliterasisasi antara dua Korea ini disebut sebagai "*the last living fossil of the Cold War"*.[6] Dalam periode awal Perang Dingin, dua negara Korea bermusuhan satu sama lain, yang puncaknya adalah Perang Korea pada 1950–1953. Meskipun Perang Korea berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, namun kedua negara ini secara teknis masih dalam keadaan perang. Zona demiliterisasi tersebut selalu dijaga oleh ribuan tentara dari kedua pihak dan tensi ketegangan di wilayah tersebut masih fluktuatif hingga saat ini.

Ketegangan yang meningkat di antara negara Korea merupakan hal yang biasa terjadi di Semenanjung Korea. Meskipun begitu, Korea Selatan selalu bersiap siaga dalam menghadapi ketegangan yang belum tampak kapan akan berakhir tersebut. Tidak hanya mengerahkan upaya domestik dengan menerapkan kebijakan wajib militer bagi setiap warga laki-laki, Korea Selatan juga bekerjasama dengan banyak negara lain. Salah satu bentuk kerjasama dalam menghadapi masalah ketegangan di Semenanjung adalah dibuatnya sebuah pakta bernama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA).

---

[4] "Demilitarized Zone", *Encyclopedia Britannica*, 4 Februari, 2020, diakses pada 6 April 2021, https://www.britannica.com/place/demilitarized-zone-Korean-peninsula.

[5] Ferry Ardiansyah, "Sekilas Mengenai Perbatasan Dua Korea", *Okezone*, 16 Juni, 2015, diakses pada 16 Oktober 2020, https://news.okezone.com/read/2015/06/15/18/1165891/.

[6] Erik Beukel, *The Last Living Fossil Of the Cold War: The Two Koreas, The Dragon And The Eagle: Towards a New Regional Security Complex in East Asia?*, (Denmark: Danish Institute for International Studies, 2012), diakses pada 21 Oktober 2020, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/97059/1/720904978.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GSOMIA merupakan sebuah pakta kerjasama intelijen antara Korea Selatan dan Jepang sejak tahun 2016. Korea Selatan memiliki beberapa alasan untuk bekerja sama dengan Jepang. Pertama, Jepang sudah mengoperasikan empat satelit intelijen yang dapat memantau bagian utara Semenanjung Korea.[7] Kedua, Jepang juga memiliki kemampuan anti-kapal selam kelas dunia.[8] Hal tersebut berarti penting bagi Korea Selatan karena Korea Utara yang sedang mengembangkan program rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam.[9] Ketiga, gagasan Korea Selatan tersebut didasarkan pada aliansinya dengan Amerika Serikat, yang menganggap Jepang sebagai landasan kebijakan Asia-nya.[10] Sehingga pembuat kebijakan Korea Selatan yang peduli terhadap keamanan nasional mau tidak mau perlu merealisasikan GSOMIA.

Kerjasama intelijen GSOMIA tersebut pada awalnya akan ditandangani pada tahun 2012, namun tertunda akibat adanya penolakan keras dari domestik Korea Selatan yang menentang ide tersebut.[11] Empat tahun kemudian di bawah pemerintahan Park Geun Hye, dia melanjutkan negosiasi dan pada November 2016, Korea Selatan dan Jepang pada akhirnya selesai menandatangani pakta intelijen

---

[7] Jaehan Park dan Sangyoung Yun, "Korea and Japan's Military Information Agreement: A Final Touch for the Pivot?", *The Diplomat*, 24 November, 2016, diakses pada 15 September 2020, thediplomat.com/2016/11/korea-and-japans-military-information-agreement-a-final-touch-for-the-pivot/.

[8] Ibid.

[9] Park Sangbo, "Implications of the General Security of Military Information Agreement for South Korea", *Stimson*, 16 Desember, 2016, diakses pada 15 September 2020, https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/.

[10] Jaehan Park dan Sangyoung Yun, "Korea and Japan's Military Information Agreement: A Final Touch for the Pivot?"

[11] Grace Shaow, "South Korea is Scrapping a Security Deal with Japan — Here's Why It Matters", *CNBC*, 23 Agustus, 2019, diakses pada 15 September 2020, https://www.cnbc.com/2019/08/23/what-is-the-korea-japan-intelligence-sharing-agreement.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer GSOMIA tersebut. Namun, kerjasama intelijen militer antara Korea Selatan dan Jepang ini tidak berjalan mulus. Pada tahun 2019, masalah sejarah antara Korea Selatan dan Jepang pada masa penjajahan Jepang melonjak sehingga berdampak pada makin merosotnya kerjasama keamanan dan ekonomi kedua negara. Kemorosotan tersebut dimulai pada bulan Oktober-November 2018, ketika Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan Perusahaan Baja Nippon dan *Mitsubishi Heavy Industries of Japan* untuk membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabriknya selama penjajahan Jepang.[12] Di tengah pertempuran hukum yang semakin meningkat ini, Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra perdagangan terpercaya pada Agustus 2019.[13] Jepang mengklaim bahwa hal itu dilakukan bukan sebagai pembalasan atas keputusan Mahkamah Agung, melainkan dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.[14] Menanggapi hal tersebut, Korea Selatan pun juga membalas dengan menghapus Jepang dari daftar mitra perdagangan terpercayanya dan mengadukan komplain kepada *World Trade Oranization* (WTO) atas kontrol ekspor dari Jepang.[15]

---

[12] "South Korea Court May Rule on Japan firm Asset Sale in Aug. at Earliest", *Kyodo News*, 4 Juni, 2020, diakses pada 23 Desember 2020, https://english.kyodonews.net/news/2020/06/1eae94c9f36d-s-korea-court-may-rule-on-japan-firm-asset-sale-in-aug-at-earliest.html?phrase=ruby&words=.

[13] Titli Basu, "Ketegangan Perdagangan Jepang-Korea Selatan", *Air World* Service, 29 Agustus, 2019, diakses pada 17 Desember 2020, airworldservice.org/indonesian/2019/08/29/keteganga-perdaganga-jepang-korea-selatan/.

[14] Lee Chung Min dan Kathryn Botto, *Overcoming Obstacles to Trilateral U.S.-ROK-Japan Interoperability*, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace Publications Department, 2020), diakses pada 21 September 2020, https://carnegieendowment.org/files/Korea_Net_Assesment_2020.pdf.

[15] Rina Ayu Larasati, "Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama", *Kompas*, 12 Agustus, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, https://money.kompas.com/read/2019/08/12/210216326/korsel-hapus-jepang-dari-daftar-mitra-dagang-utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang memunculkan perselisihan dengan implikasi politik. Satu hari setelah menteri luar negeri Jepang dan Korea bertemu di China untuk membahas perdagangan dan keamanan nasional pada Agustus 2019, Korea Selatan mengumumkan bahwa mempertahankan pakta intelijen militer GSOMIA bukanlah kepentingan nasional Korea Selatan lagi.[16] Pernyataan dari Korea Selatan tersebut menyebabkan isu keamanan yang lebih luas lagi di Asia. Hal itu dikarenakan GSOMIA adalah kerjasama militer yang memungkinkan Korea Selatan dan Jepang untuk berbagi informasi militer, terutama mengenai aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.[17]

Namun, tiga bulan setelah pengumuman pemutusan GSOMIA, Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan tetap melanjutkan pakta GSOMIA tersebut dengan Jepang. Pada November 2019, Wakil Direktur Kantor Keamanan Nasional Kepresidenan Korea Selatan Kim Yoo Geun, mengumumkan bahwa pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menangguhkan pemutusan GSOMIA secara bersyarat dengan Jepang dan bahwa pemerintah Jepang telah menyatakan pengertiannya.[18]

Tindakan Korea Selatan yang merubah keputusannya untuk tetap melanjutkan pakta intelijen GSOMIA dengan Jepang ini menarik perhatian penulis untuk ingin menganalisis lebih lanjut mengenai alasan dibalik perubahan keputusan

---

[16] Ibid.

[17] Andrew Yeo, "South Korea Pulled Out of a Military Intelligence-Sharing Agreement with Japan. That's a Big Deal", *The Washington Post*, 27 Agustus, 2019, diakses pada 15 September 2020, https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/27/south-korea-pulled-out-military-intel-sharing-agreement-with-japan-thats-big-deal/.

[18] Aoki Yoshiyuki, "What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?", *NHK World* Japan, 25 November, 2019, diakses pada 15 September 2020, https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/763/#:~:text=South%20Korea%20announced%20last%20week,known%20as%20GSOMIA%2C%20in%20place.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korea Selatan tersebut. Penulis meyakini bahwa sebuah kebijakan luar negeri pasti dibentuk atas beberapa pertimbangan, baik dari kondisi domestik maupun kondisi eksternal. Salah satu alasan di balik perubahan keputusan itu diduga karena adanya desakan kuat dari Amerika Serikat.

Satu minggu sebelum pengumuman penangguhan pemutusan kerjasama tersebut, pejabat tinggi militer Amerika Serikat mengunjungi Korea Selatan dalam rangka pertemuan tahunan *Security Consultative Meeting* dengan para pejabat militer Korea Selatan untuk mendiskusikan kerjasama pertahanan bilateral dan masalah keamanan seputar aliansi. Namun rupanya, Amerika Serikat juga menyerukan agar Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi di sisi lain, dari *polling* yang dibuat oleh salah satu media Korea Selatan menunjukkan bahwa opini publik Korea Selatan cenderung menyetujui pemerintahan untuk tidak melanjutkan pakta GSOMIA lagi dengan Jepang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut alasan dan pertimbangan apa saja yang menyebabkan Korea Selatan mengubah keputusannya untuk tidak jadi menarik diri dari GSOMIA pada bulan November 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: **“**Mengapa Korea Selatan Tidak Jadi Menarik Diri dari Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* pada Tahun 2019?”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta intelijen *General Security of Military Information Agreement* pada tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para pembaca tentang alasan dibalik Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta intelijen *General Security of Military Information Agreement* pada tahun 2019. Penelitian ini akan menjelaskan hasil ilmiah berupa analisis terkait berbagai faktor yang dapat memengaruhi pembuat kebijakan luar negeri dalam mengambil keputusan. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai acuan untuk menulis jurnal atau penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan analisis kebijakan luar negeri Korea Selatan. Penelitian ini juga bisa digunakan menjadi bahan bahan perdebatan atau diskusi lanjut bagi akademisi Hubungan Internasional.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi pedoman maupun acuan bagi pemerintah Indonesia, khusunya saat akan melakukan kerjasama dengan negara lain demi memutuskan kebijakan luar negeri yang terbaik. Sebab sebuah kebijakan harus dibentuk atas dan dengan tujuan mencapai kepentingan rakyat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebab melalui ini, penulis dapat menerapkan teori-teori hubungan internasional yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan strata satu.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis akan memanfaatkan penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki topik dan tema yang terkait dengan judul penelitan yang diangkat oleh penulis. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai acuan dalam membuat penelitian, serta menjadi materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Tinjauan pustaka pertama berjudul "Kepentingan Korea Selatan dalam Deklarasi Panmunjom pada Masa Pemerintahan Moon Jae-in" yang ditulis oleh Annisa Arjlia pada tahun 2019. Penelitian tersebut mengkaji kepentingan Korea Selatan di masa Presiden Moon Jae-in pada tahun 2018 yang melasanakan sebuah deklarasi bernama Deklarasi Panmunjom. Deklarasi yang dilaksanakan di sebuah desa bernama Panmunjom dengan dihadiri kedua presiden negara Korea tersebut berisikan beberapa komitmen antara Korea Selatan dan Korea Utara dalam mewujudkan upaya denuklirisasi di wilayah Semenanjung Korea. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Deklarasi Panmunjom berdasarkan perspektif Korea Selatan dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, konsep keamanan nasional, dan konsep bipolar. Apabila dilihat dalam jangka pendek, deklarasi tersebut tampak lebih menguntungkan Korea Utara sebab kedua negara setuju untuk memperbaiki kerjasama demi meningkatkan kemakmuran rakyat di berbagai bidang. Mengingat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat perekonomian Korea Selatan yang lebih makmur, maka Korea Selatan memiliki andil besar serta perlu berupaya keras untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di Korea Utara pula. Namun apabila dilihat dari jangka panjang, deklarasi tersebut merupakan implementasi dari bagaimana cita-cita Korea Selatan dapat terlaksanakan, mengingat Korea Selatan adalah negara yang akan paling merugi apabila Korea Utara terus selalu melakukan uji coba rudal. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa alasan utama Korea Selatan melakukan kesepakatan damai dengan Korea Utara ialah demi menciptakan kawasan Semenanjung Korea yang damai pada tahun 2022. Dengan terwujudnya perdamaian di Semennanjung Korea, hal tersebut akan berimbas mulai dari jaminan kamanan bagi pariwisatawan hingga peningkatan investasi luar negeri ke Korea Selatan.

Tinjauan pustaka kedua berjudul "Korea Selatan dan Provokasi Korea Utara: Taktik Pengaruh dan Persuasi pada Masa Pemerintahan Lee Myung Bak" yang ditulis oleh Arfin Sudirman pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam mencegah provokasi dari Korea Utara pada periode tiga tahun pertama pemerintahan Presiden Lee Myung Bak pada 2008-2010. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis K. J. Holsti mengenai aksi kebijakan luar negeri dalam memaknai taktik "pengaruh" Korea Selatan yang dilakukan oleh Presiden Lee Myung Bak dalam menghadapi provokasi dari Korea Utara. Jika pada umumnya analisis kebijakan luar negeri berfokus pada analisis tipe kepentingan yang dikejar oleh negara, peran dari faktor domestik, dan bagaimana sistem internasional mempengaruhi aksi suatu negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap lingkungan eksternalnya, analisis dalam penelitian ini berfokus pada teknik utama yang digunakan oleh negara dalam mencapai serta mempertahankan tujuan, kepentingan, dan orientasi dari kebijakan luar negerinya. Hasil dari penelitian tersebut adalah taktik "pengaruh" yang digunakan untuk mencegah provokasi Korea Utara dilakukan oleh Korea Selatan dengan memanfaatkan kapabilitas ekonominya untuk mendukung kebijakan tersebut. Penggunaan taktik "pengaruh" juga bergantung pada tingkat aksi provokasi yang dilakukan Korea Utara, mulai dari penggunaan taktik persuasi, taktik penalti hukuman non-kekerasan, hingga taktik kekerasan secara terbatas apabila aksi provokasi tidak dapat dihentikan dengan taktik lain.

Tinjauan pustaka selanjutnya berjudul "Analisis Kebijakan Luar Negeri Presiden Moon Jae-in terhadap Korea Utara Melalui *Inter-Korean Summit* Tahun 2018" yang ditulis oleh Rafi Widyadhana Saputra pada tahun 2020. Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri pada Presiden Moon Jae-in yang berupa *Inter-Korean Summit* 2018. Dalam menganalisis, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, konsep diplomasi, dan konsep *summitry*. Upaya Moon Jae-in dalam menormalisasikan hubungan dengan Kore Utara hampir seluruhnya menggunakan cara diplomasi. Salah satu bentuk implementasi dari upaya diplomasi Korea Selatan ialah *Inter-Korean Summit* 2018. *Summit* tersebut dilakukan dengan berinteraksi tatap muka antar kedua Presiden Korea dan juga menghasilkan sebuah deklarasi bernama Deklarasi Panmunjom. Deklarasi tersebut berisikan tujuh poin utama, yaitu denuklirisasi, kunjungan Pyeongyang, rezim damai, reuni keluarga yang terpisah akibat Perang Korea, bergabung dalam olimpiade olahraga, pelucutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejata, dan tidak ada perang. Pada akhirnya, *Inter-Korean Summit* 2018 tersebut berhasil menyebabkan adanya perubahan paradigma yang positif dalam hubungan negara Korea Selatan dan Korea Utara.

Tinjauan pustaka keempat berjudul "Analisis Pendekatan *Trust Politic* dalam Penyelesaian Hambatan Reunifikasi di Semenanjung Korea" yang ditulis oleh Elpeni Fitrah pada tahun 2018. Penelitian ini membahas pendekatan *trust politic* pada masa pemerintah Park Geun Hye dalam menangani hambatan reunifikasi negara Korea. Komunitas internasional mempercayai bahwa ada tiga bentuk hambatan dalam proses reunifikasi di Semenanjung Korea, yaitu: perbedaan ideologi, provokasi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan program senjata nuklir milik Korea Utara. Namun jika dilihat dari perspektif Konstruktivis, hambatan utama dalam proses reunifikasi adalah adanya krisis kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh karena itu, Presiden Park Geun Hye berusaha untuk mengubah krisis kepercayaan tersebut dengan menggunakan pendekatan *trust politic* untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Meskipun Park Geun Hye tidak dapat menyelesaikan jabatannya sebagai presiden akibat kasus korupsi yang dilakukannya, namun ada beberapa pencapaian dalam meningkatkan kepercayaan Korea Utara terhadap Korea Selatan, seperti contohnya permasalahan pulau Yeonpyeong dan penenggelaman kapal laut Cheonan pada tahun 2010 menjadi terselesaikan, terdapat pencapaian dalam normalisasi komplek industri Kaesong yang telah bangkrut, adanya keberlanjutan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara melalui UNICEF, badan program pangan dunia (*World Food*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Programme), dan *World Health Organization* (WHO) untuk menghindari politisasi masalah kemanusiaan, serta terciptanya taman perdamaian di Demilitarized Zone.

Tinjauan pustaka kelima berjudul "Japan-Korea: *Working Together in East Asia and Beyond"* yang ditulis oleh *the Japan Working Group* yang merupakan projek *Pacific Forum* CSIS yang beroperasi sebagai lembaga penelitian kebijakan luar negeri nonprofit dan nonpartisan. Laporan penelitian ini adalah produk akhir dari upaya pertama dari *the Working Group*, dengan fokus pada tema kerjasama Korea Selatan dan Jepang di Asia Timur dan diluarnya. Laporan penelitian ini mencakup lima ringkasan kebijakan dengan rekomendasi konkret tentang bidang kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan. Meskipun rekomendasi ini berkhusus untuk hubungan Jepang-Korea, namun juga berkaitan dengan Amerika Serikat yang memiliki keinginan untuk bekerjasama secara trilateral yang lebih kuat dengan Jepang dan Korea Selatan. Salah satu bidang yang dieksplorasi adalah argumen untuk meningkatkan pertukaran antar-parlemen Jepang-Korea sebagai jalan lain untuk kerjasama politik. Laporan penelitian ini juga memiliki uraian singkat mengenai pakta *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yang merupakan pakta mengenai peningkatan kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan dengan fokus pada pencegahan terhadap Korea Utara serta perencanaan kontingensi untuk penyatuan Semenanjung Korea. Hasil dari laporan penelitian ini adalah terlepas dari ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang, masih terdapat ruang lingkup yang signifikan untuk bekerjasama. Terutama mengenai masalah di Semenanjung Korea, biaya dan resiko jangka pendek yang terkait dengan reunifikasi Korea ialah akan sangat besar. Namun, baik Korea

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan maupun Jepang memiliki peluang untuk mengurangi biaya dan resiko tersebut jika mereka dapat melakukan pengelolaan bersama dengan mengesampingkan masalah sejarah yang selalu menjadi hambatan keduanya dalam bekerjasama.

Tinjauan pustaka keenam berjudul "Keputusan Korea Selatan Menunda Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Bidang Militer dengan Jepang (2012)" yang ditulis oleh Asri Kusumastuty pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Lee Myung Bak yang membatalkan melakukan penandatangan pakta GSOMIA tepat satu jam sebelum jadwal penandatangan. Dalam menganalisis, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri, konsep persepsi ancaman, konsep *security of dilemma*, dan analisis *two level game*. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa alasan Korea Selatan membatalkan penandatangan tersebut dikarenakan faktor domestik dan faktor eksternal. Faktor domestik itu disebabkan oleh struktur pemerintahan dan tekanan publik Korea Selatan. Sedangkan faktor eksternal itu terkait dengan modernisasi militer Jepang.

Tinjauan pustaka ketujuh berjudul "Pembatalan Korea Selatan Terhadap Kerjasama General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) Dengan Jepang" yang ditulis oleh Romandhika Adi Prasetya pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Lee Myung Bak yang tidak jadi melakukan penandatangan pakta GSOMIA pada tahun 2012. Dalam menganalisis, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan model politik birokrasi. Dalam penelitian tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan bahwa salah satu faktor dari pembatalan penandatangan oleh Korea Selatan adalah karena adanya sentimen publik yang anti-Jepang dengan didukung partai oposisi Korea Selatan. Sentimen anti-Jepang tersebut menguat di Korea Selatan setelah Perdana Menteri Shinzo Abe menyangkal adanya keterlibatan militer Jepang dalam praktek sistem perbudakan seksual pada masa Perang Dunia II. Pernyataan itu membuat publik Korea Selatan marah dan melakukan protes besar-besaran kepada pemerintah sehingga penandatanganan GSOMIA pun gagal pada 2012.

Tinjauan pustaka yang kedelapan berjudul "Pengaruh Nuklir Korea Utara Terhadap Prakarsa Jepang dalam Pembentukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan Melalui General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)" yang ditulis oleh Saiful Millah pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada tujuan Jepang untuk melakukan kerjasama dalam bidang keamanan dengan Korea Selatan. Dalam menganalisis, penulis menggunakan konsep *security dilemma* dan konsep *balance of power*. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa tujuan Jepang membentuk aliansi dengan Korea Selatan adalah untuk menyeimbangkan kekuatan Korea Utara yang memiliki senjata nuklir yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi Jepang. Alasan Jepang mengajak Korea Selatan adalah karena ketidakmampuan Jepang untuk mengembangkan militernya secara mandiri karena terikat oleh payung keamanan Amerika Serikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 di undang-undang Jepang yang menyatakan bahwa Jepang hanya dapat memiliki militer yang terbatas hanya untuk keamanan nasional dan Jepang juga dilarang untuk mengembangkan senjata nuklir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan pustaka kesembilan berjudul "Implikasi Penanganan Masalah *Comfort Women* terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan pada Tahun 2015-2019" yang ditulis oleh Jeniffer Gracellia pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada dampak isu *Comfort Women* terhadap aliansi Jepang-Korea Selatan. Dalam menganalisis, penulis menggunakan teori konstruktivisme dan temuan dalam penelitian ini adalah bahwa isu *Comfort Women* telah memberikan tiga dampak pada aliansi Jepang-Korea Selatan, yaitu: 1) Perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang tahun 2019, 2) Penarikan Korea Selatan dari *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA), dan 3) Boikot produk Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. Masalah *Comfort Women* yang belum dapat terselesaikan tersebut juga mempengaruhi perekonomian, keamanan nasional dan kehidupan sosial masyarakat kedua negara.

Tinjauan Pustaka yang kesepuluh berjudul "Dinamika Politik Korea Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Proses Kesepakatan *General Security of Military Information Agreement* Periode 2013-2016" yang ditulis oleh Azeem Nur Taqwin pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *prospect theory* untuk berfokus pada pengaruh dinamika politik Korea Selatan dalam proses kesepakatan *General Security of Military Information Agreement* pada 2013-2016. Didasarkan pada gagalnya penandatanganan GSOMIA di tahun 2012, penulis meyakini bahwa adanya perubahan di sektor domestik Korea Selatan dari tahun 2013 hingga 2016 yang menyebabkan pada akhirnya kerjasama di bidang intelijen militer ini berhasil ditandatangani oleh Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan pustaka yang kesebelas berjudul "Understanding Japan–South Korea Cooperation and Friction Through Neoclassical Realist Theory" yang ditulis oleh Anna Kim pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan penyebab di balik gesekan dan kerjasama yang terputus-putus antara Korea Selatan dan Jepang. Aspek historis tidak diragukan lagi merupakan faktor yang sangat diperlukan yang berkontribusi pada hubungan yang retak. Namun, permusuhan sejarah itu sendiri tidak dapat menjelaskan penyebab di balik gesekan dan kerja sama yang terjadi. Teori aliansi menyatakan bahwa negara akan bersekutu melawan ancaman bersama. Meskipun demikian, Jepang dan Korea Selatan telah gagal untuk bekerja sama bahkan ketika tingkat ancaman regional tinggi. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori *quasi-alliance* dari Victor Cha yang menekankan pada peran pelindung pihak ketiga dan tingkat komitmennya kepada masing-masing sekutunya sebagai faktor penentu dalam kerjasama atau friksi antar pemain regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji prediksi teori ini. Artikel tersebut mencoba untuk menentukan persepsi Jepang dan Korea Selatan tentang komitmen Amerika Serikat selama pemerintahan Obama dan pemerintahan Trump.

Tinjauan pustaka keduabelas berjudul "Analisis Penundaan Penandatanganan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) Antara Korea Selatan dengan Jepang pada Masa Pemerintaha Lee Myung Bak Tahun 2008-2012" yang ditulis oleh Ika Septiana Rimasari. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *two-level games* untuk mengetahui alasan penundaan penandatanganan GSOMIA yang memiliki manfaat bagi Jepang dan Korea Selatan. Temuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah bahwa proses negosiasi terbagi ke dalam dua tingkat, yaitu level I yang dipengaruhi oleh strategi para negosiator dan level II yang dipengaruhi oleh faktor domestik Korea Selatan yang terkait dengan preferensi politik dan koliasi yang menyebabkan pakta GSOMIA sempat mengalami penundaan penandatanganan.

Tinjauan pustaka ketigabelas berjudul "Korean Perception on Defense Cooperation with Japan" yang ditulis oleh Masatoshi Asaoka pada tahun 2016. Penelitian ini melihat kondisi kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Jepang dan kemungkinan perbaikan di masa depan. Republik Korea dan Jepang adalah dua sekutu keamanan terpenting Amerika Serikat di Asia Timur, namun mereka kekurangan kerja sama pertahanan yang substansial antara satu sama lain. Dengan menggunakan model *quasi-aliance*, penelitian ini memperkenalkan kapabilitas model komplementer untuk menjelaskan apa yang diperlukan untuk kerjasama pertahanan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa sekutu semu ini hanya akan meningkatkan kerjasama pertahanan apabila Korea Selatan merasa keamanannya terancam dan kemampuan Jepang setara dengan kemampuannya.

F. Argumentasi Utama

Dalam skripsi ini, penulis menduga bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Korea Selatan untuk tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA pada bulan November 2019. Penulis menduga bahwa alasan utama Korea Selatan mengubah keputusannya tersebut adalah karena kepentingan keamanan nasional Korea Selatan yang masih belum bisa dianggap aman dari ancaman nuklir Korea

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utara. Di bawah pemerintahan Presiden Moon Jaein, Korea Selatan melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar-Korea untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2007. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga berhasil menjembatani KTT Korea Utara-Amerika Serikat yang pertama pada 12 Juni 2018 dan yang kedua pada 27-28 Februari 2019. Akan tetapi, KTT Korea Utara-Amerika Serikat yang kedua tidak membuahkan hasil yang baik. Setelah itu, Korea Utara juga mulai meluncurkan rudal lagi pada Mei 2019, peluncuran pertama sejak November 2017. Dengan alasan itu, penulis menduga bahwa alasan utama Korea Selatan merubah keputusannya untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah karena dinamika ketegangan yang masih fluktuatif di Semenanjung Korea tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pemelitian ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I

Bab I merupakan bagian pembuka dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, argumentasi utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini berisi tentang gambaran tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian secara keseluruhan dengan tujuan agar pembaca dapat mendapatkan informasi dan tertarik untuk membaca lebih lanjut.

BAB II

Bab II dalam penelitian ini berisikan kerangka konseptual yang penulis gunakan sebagai pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis. Dalam penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, penulis akan menggunakan konsep keamanan nasional dan teori kebijakan luar negeri oleh James N. Rosenau.

BAB III

Bab III dalam penelitian ini berisikan metode yang penulis tempuh dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, tingkat analisa, tahapan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV

Bab IV dalam penelitian ini memaparkan pembahasan dari hasil penelitian penulis terkait apa alasan dibalik tindakan Amerika Serikat yang mendesak Korea Selatan untuk tetap melanjutkan kerjasama bersama Jepang dengan menggunakan konsep keamanan nasional serta lima variabel yang dijelaskan oleh James N. Rosenau.

BAB V

Bab V dalam penelitian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran terhadap pihak yang terkait dengan tujuan supaya penelitian-penelitian yang memiliki topik terkait dengan penelitian bisa menjadi lebih baik ke depannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Keamanan Nasional

Walter Lippman mendefiniskan keamanan nasional sebagai keadaan aman suatu bangsa selama mereka tidak dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggap penting.[19] Menurut Berkowitz, keamanan nasional adalah kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar.[20] Sedangkan menurut Cihen dkk., keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi protektif yang para negarawan berusaha capai atau jaga dalam rangka mengamankan berbagai macam komponen politik dari ancaman dalam dan luar.[21] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa keamanan nasional adalah penjagaan suatu bangsa secara keseluruhan dari segala macam bentuk ancaman.

Dalam memahami keamanan nasional dengan lebih komprehensif, perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari keamanan. Secara tradisional, para ahli biasanya menafsirkan keamanan sebagai situasi yang bebas dari ancaman, ketakutan, dan kecemasan. Menurut Barry Buzan dalam artikelnya yang berjudul "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century", keamanan merupakan upaya dalam mengejar kebebasan dari ancaman dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas independen mereka dan integritas

[19] Walter Lippmann, *U.S. Foreign Policy*, (Boston: Little, Brown and Company, 1943).

[20] Morton Berkowitz dan Bock P.G Berkowitz, *American National Security*, (New York: Free Press, 1965).

[21] Ira S. Cohen dan Andrew C. Tuttle, *National Security Affairs: A Syllabus*, (USA: National Strategy Information Center, 1972).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsional mereka melawan sebuah kekuatan yang mereka anggap sebagai ancaman.[22]

Menentukan bentuk ancaman negara tidaklah mudah karena cakupannya yang terlalu luas. Oleh karena itu, Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul "People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations" mengatakan bahwa "terdapat tiga landasan keamanan nasional, yaitu landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik".[23] Landasan ideasional yang dimaksud Buzan dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang "pengetahuan kebangsaan", landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, sedangkan landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya. Dalam hal ini, asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi ancaman atau gugatan atas legitimasinya perlu mengandung sedikit tiga komponen, yaitu kedaulatan wilayah, lenbaga-lembaga negara yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya ketertiban, keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam artikelnya, Buzan juga mengatakan bahwa terdapat lima sektor keamanan yaitu politik, militer, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.[24] Lima sektor ini tidak bekerja secara terpisah satu sama lain, namun saling terhubung dalam jaringan keterkaitan yang kuat.[25] Dalam hal ini, kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang dalam bidang intelijen merupakan bentuk dari adanya bentuk

---

[22] Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century", *International Affairs Journal* Vol. 67 No. 3 (1991), https://doi.org/10.2307/2621945.

[23] Barry Buzan, *People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations*, (Brighton, Sussex: Department of International Studies University of Warwick, 1983).

[24] Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century"

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan dalam keamanan militer yang disebabkan oleh ancaman nuklir dari Korea Utara. Oleh karenanya, melanjutkan pakta GSOMIA adalah salah satu usaha dari pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi ancaman tersebut.

Keamanan nasional juga dipengaruhi oleh cita-cita dari suatu negara. Jika cita-cita sebuah negara kuat dan dipegang secara luas, maka negara tersebut dapat bertahan dalam masa-masa lemah tanpa ancaman serius terhadap keseluruhan integritasnya. Namun, apabila cita-cita negara dipegang dengan lemah, maka hilangnya kekuatan institusional mungkin dapat menyebabkan perang saudara, disintegrasi negara, dan keruntuhan-keruntuhan lainnya. Oleh karenanya, penataan kembali kebijakan dan aturan perundangan yang berkaitan dengan keamanan nasional menjadi sangatlah penting. Kebijakan itu harus dengan jelas mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan nasional dan bagaimana ancaman itu harus dihadapi.

Keamanan nasional erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses melindungi hal tersebut, negara perlu memanfaatkan *power* dan *resources* yang dimilikinya. Sebab dengan melindungi kesejahteraan masyarakat, keamanan nasional akan dapat tercapai. Oleh karena itu, keamanan tidak hanya berorientasi pada negara dengan hanya mengandalkan kekuatan militer semata, namun juga ditujukan untuk melindungi rakyat dari kondisi yang mengancam yang disebabkan oleh faktor militer maupun non-militer yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena bagaimanapun, negara adalah suatu wilayah yang memiliki aturan atau sistem yang berlaku bagi setiap individu yang tinggal di dalam wilayah tersebut dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu syarat primer didirikannya negara adalah memiliki rakyat, sehingga negara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan tiap rakyatnya.

Dalam perancangan strategi keamanan nasional, pertahanan nasional dan kebijakan luar negeri harus dilihat sebagai sesuatu yang saling menguatkan dan menyeimbangkan. Oleh karenanya, tiap negara membutuhkan tentara yang kuat dan aktif disertai dengan intelijen yang efektif, sistem hukum yang baik, keamanan siber, dan kebijakan imigrasi untuk melindungi tanah air dan mengamankan perbatasan negara.

Dari deskripsi mengenai konsep keamanan nasional di atas, dapat disimpulkan bahwa keamanan nasional merupakan seperangkat gagasan terkait ancaman bagi negara serta bentuk upaya yang dilakukan negara dalam menangkal sebuah ancaman. Bentuk ancaman dalam penelitian ini adalah ancaman militer dari yang ditimbulkan oleh ancaman nuklir Korea Utara. Konsep keamanan nasional ini akan membantu penulis untuk mengkerucutkan alasan mengapa Korea Selatan tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019.

B. Teori Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau

Kebijakan luar negeri adalah bentuk interaksi antar sesama aktor *state* atau antara aktor *state* dan aktor *non-state* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik.[26] Joseph Frankel mendefinisikan bahwa kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan tindakan yang melibatkan sampai batas tertentu hubungan antara

[26] James N. Rosenau, "A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence." *International Studies Quarterly* 28, No. 3 (1984): 245-305. Diakses pada 25 Desember 2020. http://www.jstor.org/stable/2600632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu negara dan negara lain.[27] Holsti berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan manifestasi eksternal dari institusi dalam negeri, ideologi, dan atribut lain dari pemerintahan.[28] Huge Gibson mendefinisikan bahwa kebijakan luar negeri adalah rencana komprehensif yang menyeluruh berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan urusan pemerintahan dengan seluruh dunia yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan negara.[29] Sedangkan menurut Padelford dan Lincoln, kebijakan luar negeri adalah "hasil keseluruhan dari proses di mana negara menafsirkan tujuan dan kepentingan yang dipahami secara luas ke dalam tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan mempertahankan kepentingannya".[30] Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri adalah implementasi dari kepentingan nasional yang mendorong suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain dengan menggunakan beberapa taktik, strategi, dan sumber daya yang ada.

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan di penelitian ini, penulis akan menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh James N. Rosenau. Awalnya, Rosenau mengatakan dalam bukunya yang berjudul "The Study of World Politics" bahwa menganalisis kebijakan luar negeri membutuhkan yang namanya *pre-theory* yang berfungsi sebagai dasar untuk dijadikan teori kebijakan luar

---

[27] Frankel J, *The Making of Foreign Policy*, (London: Oxford University Press, 1968), diakses pada 3 Oktober 2020, https://doi.org/10.1177/004711787000300708.

[28] Holsti, *Making American Foreign Policy*, (New York: Routledge, 2006), diakses pada 5 November 2020, https://doi.org/10.4324/9780203625446.

[29] Gibson H, *The Road to Foreign Policy*, (New York: Doubleday, Doran and Company, 1944), diakses pada 3 Oktober 2020, https://doi.org/10.2307/1949201.

[30] Padelford dan Lincoln, *The Dynamics of International Politics*, (New York: Macmillan Company, 1977), diakses pada 3 Oktober 2020, https://doi.org/10.1177%2F097492846301900405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri. [31] Dalam *pre-theory* Rosenau, terdapat lima variabel yang dapat menpengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.[32]

Variabel pertama adalah Individu. Variabel individu ini mencakup karakteristik dari para pembuat kebijakan luar negeri. Hal ini berkaitan dengan nilai, bakat, dan pengalaman dari sang pembuat kebijakan. Rosenau mengatakan dalam bukunya bahwa variabel individu bukanlah sesuatu yang tidak dianggap keberadaannya.[33] Variabel ini memiliki peran penting karena berperan penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan bahkan dapat menjadi kekuatan utama di panggung global.[34]

Variabel kedua adalah peran. Variabel peran ini berkaitan dengan peranan yang ditempati oleh pengambil keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan jabatannya, tanpa memperhatikan karakteristik individunya.[35] Variabel ini merujuk pada ekspektasi yang dibawa oleh para atasan, birokrasi, publik domestik, atau musuh serta sekutu asing terhadap keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan luar negeri yang menempati perannya saat menghadiri pertemuan.[36]

Variabel ketiga adalah sosial. Variabel ini terdiri dari aspek-aspek nonpemerintah dari suatu masyarakat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Saat ini, dengan adanya peran individu yang makin terampil, dengan adanya organisasi yang lebih koheren, banyak, dan aktif, disertai dengan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan banyak membuat variabel sosial ini makin

---

[31] James N. Rosenau, *The Study of World Politics*, (New York: Routledge, 2006), hal. 171.
[32] Ibid., halaman 172-173.
[33] Ibid., halaman 203.
[34] Ibid.
[35] Ibid., halaman 172-173.
[36] Ibid., halaman 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhitungkan dalam menentukan kebijakan luar negeri.[37] Apalagi jika opini masyarakat terbelah menjadi dua atau lebih, potensi variabel sosial ini akan makin memiliki peran penting karena hal tersebut membuat pejabat kebijakan luar negeri semakin sulit untuk memobilisasi dukungan yang memadai untuk kebijakan mereka.

Variabel keempat adalah sistemik. Variabel ini mencakup aspek nonmanusiawi yang dapat mempengaruhi pilihan dalam membuat kebijakan luar negeri. Geografi, ideologi, aliansi negara adalah contoh nyata dari variabel sistemik yang dapat membentuk keputusan dan tindakan pembuat kebijakan luar negeri.[38] Variabel sistemik ini bisa dikatakan tidak pasti, karena kondisi sistem yang berubah-rubah dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri sewaktu-waktu. Dengan meningkatnya kepadatan aktor di panggung global dan ancaman-ancaman yang dapat melintasi batas-batas negara, hal tersebut telah menyebabkan pejabat kebijakan luar negeri untuk harus memperhatikan peran variabel sistemik.[39]

Variabel kelima adalah pemerintah. Variabel ini mengacu pada aspek-aspek struktur pemerintah, seperti antara eksekutif dan legislatif, apakah saling membatasi atau meningkatkan dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Namun, Rosenau mengatakan bahwa variabel individu, sosial, dan sistemik telah membatasi variabel pemerintah sebagai faktor penentu kebijakan luar negeri dikarenakan kompleksitas birokrasi pembuatan kebijakan yang ada pada model pemerintahan saat ini semakin membatasi kapasitas pemerintah dalam berbicara dan bertindak dengan tegas dalam satu suara.[40] Oleh karena itu, variabel pemerintah saat ini telah menjadi pengikut

[37] Ibid., halaman 205.
[38] Ibid., halaman 173.
[39] Ibid., halaman 205.
[40] Ibid., halaman 203-204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jalannya peristiwa. Pertimbangan pemerintah dan pertengkaran birokrasi internal mungkin masih memiliki peran dalam menentukan kebijakan luar negeri, akan tetapi variabel pemerintah saat ini tampak tidak kuat jika dibandingkan dengan model pemerintahan di zaman dahulu.

Menurut Rosenau, kelima variabel diatas memiliki perannya masing-masing dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Meski begitu, lima variabel tersebut tidak harus memiliki peran yang seimbang dalam menentukan sebuah kebijakan. Maksudnya, akan pasti terjadi situasi dimana satu variabel bersikap lebih mendominasi dari variabel lainnya.

Namun dalam buku yang berjudul "A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence" yang dirilis pada tahun 1984, Rosenau melakukan revisi atas *pre-theory* yang dijelaskannya dalam buku yang berjudul "The Study of World Politics". Rosenau mengatakan bahwa variabel pemerintah dianggap semakin tidak memiliki andil dalam memutuskan kebijakan luar negeri karena pada era modern ini, pemerintah mengalami penurunan kemampuan dalam menyediakan kondisi dan layanan yang mencerminkan tujuan yang telah mereka tetapkan dari awal.[41] Catatan kinerja pemerintah modern tampak sangat sedikit dibandingkan dengan kebijakan luar negeri di masa lalu yang seakan merupakan olahraga para raja.[42] Seperti yang dikatakan Shils, kondisi di mana tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif tidak lagi diperoleh di negara mana

[41] James N. Rosenau, "A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence", *International Studies Quarterly*, Vol. 28, No. 3 (September, 1984), halaman 278.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun, baik negara maju dan kaya maupun terbelakang dan miskin.[43] Tuntutan yang riuh sebagai reaksi atas berbagai macam tindakan pemerintah selalu ada dan sulit bagi kelompok mana pun untuk tetap menjabat dalam waktu lama kecuali apabila mereka menyerah pada tuntutan dari masyarakatnya.

Selain itu, Rosenau juga mengatakan bahwa peran variabel pemerintah dalam urusan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh variabel sosial dan sistemik.[44] Tuntutan dari masyarakat dan tekanan dari sistemik yang mendominasi dapat menyebabkan pihak pemerintahan tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkannya. Akan tetapi, menempatkan pemerintah sebagai sesuatu yang semakin dibatasi oleh kendala domestik dan asing tidak berarti bahwa variabel ini berhenti menjadi aktor utama di panggung internasional. Pemerintah tetap memiliki otoritas yang cukup besar dan kebijakan luar negeri mereka masih merupakan tindakan yang paling mencolok di atas panggung internasional. Variabel pemerintah masih mempertahankan serangkaian mekanisme adaptif untuk tawar-menawar, mensintesis, atau memainkan berbagai tuntutan satu sama lain.[45] Dan dengan melakukan itu, variabel ini masih dapat memberikan pengaruh dalam urusan kebijakan luar negeri.

Rosenau juga mengatakan bahwa variabel pemerintah dianggap semakin tidak memiliki andil dalam memutuskan kebijakan luar negeri karena aktor dan

---

[43] Shils, 1982, "The Political Class in the Age of Mass Society: Collectivistic Liberalism and Social Democracy", dalam "Does Who Governs Matter?: Elite Circulation in Contemporary Societies", edited by M. M. Czudnowski, halaman 25. DeKalb: Northern Illinois University Press.

[44] James N. Rosenau, "A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence", halaman 279.

[45] Ibid., halaman 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu internasional semakin terampil dalam peran publiknya.[46] Meningkatnya peran individu ini menurut Rosenau disebabkan oleh globalisasi yang mengarah pada meningkatnya informasi dan teknologi sehingga membuat tiap individu dapat meningkatkan bakatnya.[47] Peran dari sekolah, tempat kerja, surat kabar, radio di era yang semakin modern ini memberi pengaruh pada individu dan memiliki kekuatan independen untuk mempengaruhi sosialisasi politik, melatih tiap individu untuk mengetahui lebih banyak tentang politik, merangsang mereka untuk tertarik pada peristiwa politik dan untuk berpartisipasi dalam urusan sipil.[48]

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa revisi Rosenau sendiri atas *pre*-theory-nya merupakan sebuah bentuk penyempurnaan dari teori kebijakan luar negeri oleh Rosenau dan dapat digunakan dalam menganalisis keputusan Korea Selatan yang membatalkan keputusannya untuk tidak jadi menarik diri dari pakta intelijen GSOMIA dengan Jepang. Dalam proses menganalisis, penulis akan terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan lima variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Setelah terkumpul, maka penulis akan menarasikannya secara runtut untuk memperoleh hasil analisis yang rapi dan terstruktur.

---

[46] Ibid., halaman 245.
[47] Ibid., halaman 290-291.
[48] A. Inkeles, "Exploring Individual Modernity", (New York: Columbia University Press: 1983), halaman 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul "Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* dengan Jepang pada Tahun 2019" adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan suatu permasalahan atau kasus yang sedang terjadi secara objektif.[49] Menurut Lexy J. Moelong, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis mengenai suatu peristiwa, perilaku, atau orang-orang yang diamati.[50] Dengan lebih berfokus pada kata-kata daripada angka, jenis penelitian ini mengamati dunia dalam pengaturan alaminya dan menafsirkan situasi untuk memahami makna yang dibuat orang dari kehidupan sehari-hari.[51] Penelitian ini menggunakan wawancara, buku harian, jurnal, observasi, dan kuesioner terbuka untuk mendapatkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang didapatkan.[52] Penelitian ini bersifat eksplorasi, dan berusaha menjelaskan 'bagaimana' dan 'mengapa' fenomena atau program sosial tertentu, sehingga dapat

[49] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 1994).

[50] Bogdan dan Taylor, dalam J. Moelong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Karya, 1975), hal. 20

[51] Richa Walia, "A Saga of Qualitative Research", *Social Crimonol* 5 (2015), 3, doi:10.4172/2375-4435.1000124.

[52] M. Zohrabi, "Mixed Method Research: Instruments, Validity, Reliability and Reporting Findings", *Theory and Practice in Language Studies* Vol. 3, No. 2, (2013), 254–262, doi:10.4304/tpls.3.2.254-262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba untuk membantu dalam memahami dunia sosial tempat manusia tinggal, dan mengapa segala sesuatunya dapat terjadi seperti demikian.[53]

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menginterpretasikan sebuah isu atau fenomena secara sistematis dari sudut pandang subjek penelitian yang sedang diteliti, serta untuk menghasilkan konsep atau teori baru. Untuk lebih jelasnya, karakteristik yang dimiliki oleh penelitian kualitatif menurut Beverley Hancock dkk. dalam buku mereka yang berjudul "An Introduction of Qualitative Research" adalah sebagai berikut[54]:

1. Penelitian kualitatif cenderung berfokus pada bagaimana orang atau kelompok orang memiliki cara yang berbeda dalam memandang sebuah realitas.
2. Penelitian kualitatif memperhitungkan kompleksitas dengan menggabungkan konteks dalam dunia nyata.
3. Penelitian kualitatif mempelajari perilaku secara alami dan juga menggunakan orang sebagai data.
4. Penelitian kualitatif berfokus pada laporan pengalaman atau pada data yang tidak dapat diekspresikan secara numerik.
5. Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi dan interpretasi.
6. Penelitian kualitatif bisa saja mengarahkan pada pengembangan konsep atau teori baru.

---

[53] D. E. Polkinghorne, "Language and Meaning: Data Collection in Qualitative Research", *Journal of Counseling Psychology*, No. 52 (2005): 137–145, doi:10.1037/0022-0167.52.2.137.

[54] Beverley Hancock dkk., *An Introduction to Qualitative Research*, (Inggris: The NIHR Research Design Service, 2009), diakses pada 6 November 2020, https://www.rds-yh.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2013/05/5_Introduction-to-qualitative-research-2009.pdf, hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Penelitian kualitatif menggunakan proses penelitian yang sistematis namun fleksibel.

Penelitian kualitatif sangatlah berkaitan dengan pengembangan penjelasan fenomena sosial. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk membantu manusia dalam memahami dunia sosial tempat mereka hidup dan mengapa segala sesuatunya bisa menjadi seperti itu. Penelitian ini berkaitan dengan aspek sosial dunia dan berusaha menjawab pertanyaan permasalahan seperti: 1) Mengapa orang berperilaku seperti itu?, 2) Bagaimana pendapat dan perilaku dapat terbentuk?, 3) Bagaimana orang dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di sekitar mereka?, dan 4) Bagaimana dan mengapa budaya dan praktik bisa berkembang dengan caranya masing-masing?[55]. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif sangatlah bervariasi, seperti: logika, etnografi, analisis wacana, studi kasus, wawancara terbuka, observasi partisipan, konseling, terapi, *grounded theory*, biografi, metode komparatif, introspeksi, kasuistik, kelompok fokus, kritik sastra, praktik meditasi , penelitian sejarah, dan masih banyak lagi.[56]

Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Penelitian ekplanatif adalah "penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat dari variabel-variabel yang diteliti".[57] Penelitian dengan pendekatan ini akan menerangkan interaksi antar variabel untuk menjelaskan faktor apa saja yang mendorong Korea Selatan untuk tidak membatalkan pakta intelijen GSOMIA

---

[55] Ibid, hal. 7.

[56] K. S. Cibangu, "Qualitative Research: The Toolkit of Theories in the Social Sciences", dalam *Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management*, ed. Asunción López-Varela, (USA: IntechOpen, 2012), hal. 95–126.

[57] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Jepang pada tahun 2019. Pendekatan ekspalanatif dalam penelitian ini ada upaya untuk menjawa rumusan masalah, yaitu "Mengapa Korea Selatan Tidak Jadi Menarik Diri dari Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* pada Tahun 2019?".

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* Dengan Jepang pada Tahun 2019" yang dikerjakan oleh penulis dilakukan dengan studi pustaka. Dikarenakan situasi *study from home* akibat pandemi global COVID-19, penelitian berlokasi di tempat tinggal penulis. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan sejak tanggal 15 September 2020, atau sejak pendaftaran seminar proposal skripsi yang telah terlaksanakan pada 12 Oktober 2020.

C. Tingkat Analisis

K. J. Holsti dalam bukunya yang berjudul "International Politics: A Framework for Analysis", mengatakan bahwa terdapat tiga tingkat analisa dalam menganalisis sebuah peristiwa hubungan internasional, yaitu individu, negara, dan sistem internasional.[58] Sistem internasional dapat dijadikan alat analisa karena hal tersebut dapat menjelaskan, meskipun tidak secara komprehensif, tentang bagaimana dan mengapa negara beraksi dan beinteraksi. Alat analisa ini tidak melihat pada kepribadian pembuat kebijakan, ideologi, atau tekanan-tekanan domestik dalam sutau negara, melainkan melihat pada bagaimana kondisi atau

[58] K. J. Holsti, "International Politics: A Framework for Analysis", halaman 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan di luar negara (eksternal). Seperti contohnya, teori dalam Hubungan Internasional yang dikenal dengan *balance of power*. Teori tersebut mendefinisikan bahwa negara akan membentuk koalisi untuk membuat keseimbangan dalam sistem dan tingkah laku negara dijelaskan dari keadaan seimbang atau tidaknya sistem tersebut. Jadi, tingkah laku kebijakan luar negeri dikonsepsikan sebagai suatu reaksi terhadap lingkungan eksternal, keseimbangan atau ketidakseimbangan unit dalam sistem.[59]

Di sisi lain, perspektif masing-masing negara juga dapat digunakan menjadi alat analisa. Dalam menjelaskan suatu tindakan negara, keadaan domestik negara dapat dijadikan acuan karena hal tersebut tentu mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan. Perang, aliansi, imperialisme, manuver-manuver diplomatik, isolasi, dan tujuan-tujuan kegiatan diplomatik dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik domestik, ideologi nasional, pendapat umum, keamanan nasional, atau kebutuhan sosial ekonomi tertentu.[60] Kebijakan luar negeri suatu negara bisa dikatakan sebagai sebuah cerminan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai serta para pemimpin negara tersebut.

Negara, bagaimanapun, merupakan unit politik yang dijalankan oleh individu-individu. Oleh karenanya, ketika muncul istilah "negara bertindak", maka sebenarnya yang dimaksud adalah para pembuat kebijakan yang merumuskan tujuan-tujuan negara, memilih dari sekian banyak opsi, dan mempergunakan sumber daya nasional untuk meraih tujuan-tujuan itu.[61] Dalam menganalisa tingkat

[59] Ibid., hal. 23.
[60] Ibid.
[61] Ibid., hal. 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu, beberapa hal yang dapat dijadikan fokus analisa adalah bagaimana idealisme, ideologi, motivasi, nilai, persepsi, atau idiosinkratik dari para individu yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisa negara karena penelitian ini akan meneliti kebijakan luar negeri Korea Selatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong negara itu untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada November 2019. Faktor-faktor tersebut dapat berupa politik domestik, pendapat publik, ideologi nasional, ataupun kepentingan keamanan nasional.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik mengambil data dari sumber-sumber literatur, seperti buku-buku, jurnal nasional dan internasional, dokumen-dokumen, situs web resmi pemerintah Korea Selatan, artikel-artikel, berita-berita, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini baik dalam bentuk cetakan maupun *online*. Selain itu, data juga diambil oleh penulis dari data primer berupa naskah perjanjian pakta GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang serta hasil wawancara melalui email dengan Profesor Brendan M. Howe, salah satu profesor di Universitas Ewha Womans, serta merupakan penasihat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Profesor Erwin Tan, seorang *associate professor* di Universitas Hankuk of Foreign Studies.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security of Military Information Agreement* dengan Jepang pada Tahun 2019" ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut disebut *interactive analysis model.* Model analisis ini memiliki empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Dalam tahap pengumpulan data, penulis akan terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada. Data yang diambil berasal dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal internasional, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dipilah dan direduksi. Tahap reduksi ini perlu dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan nantinya. Tahapan ini dlakukan dengan menyingkirkan data yang kurang relevan. Adapun jika terdapat data yang dirasa kurang mencukupi, maka penulis akan melakukan pencarian data lagi. Setelah data direduksi, penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan membuat narasi ke dalam kata-kata sekaligus melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan konsep yang digunakan penulis untuk menganalisis topik permasalahan. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan di Bab I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang didapatkan. Menurut Sugiyono, terdapat empat teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, kecukupan referensi.

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mencari data secara studi pustaka secara terperinci. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk menambah informasi dan menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari studi pustaka. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan data dari berbagai sumber, yaitu artikel online, situs web resmi, dan hasil wawancara. Sedangkan kecukupan referensi dilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya secara studi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis teliti.

G. Alur Penelitian

Hal pertama yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi adalah menyusun proposal skripsi. Dalam penyusunan proposal skripsi, penulis terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen wali dan Kepala Program Studi Hubungan Internsional. Setelah proposal dinyatakan siap, penulis melakukan seminar proposal dengan didampingi oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seminar proposal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguji kematangan proposal penelitian yang penulis tulis.

Seusai menyelesaikan seminar proposal, penulis perlu melakukan perbaikan dalam penulisan berdasarkan apa yang sudah diarahkan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji saat seminar proposal. Selagi melakukan perbaikan, penulis juga mengembangkan apa yang telah ditulis dalam proposal skripsi menjadi Bab I, Bab II, dan Bab III. Setelah itu, penulis akan mengumpulkan sumber-sumber yang sekiranya relevan untuk dijadikan sumber pencarian data. Setelah data cukup terkumpul, data siap disajikan dalam bentuk eksplanatif. Penulis mulai mengolah dan melakukan analisis berdasarkan data yang telah didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang sudah dianalisis akan diambil kesimpulannya kemudian dipertanggungjawabkan dalam sidang skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Urgensi *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) bagi Korea Selatan

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) adalah sebuah bentuk kerjasama dalam bidang intelijen militer antara Korea Selatan dan Jepang sebagai respon atas ancaman nuklir dari Korea Utara, yang juga merupakan perjanjian militer pertama antara Korea dan Jepang sejak pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada tahun 1945. GSOMIA mengandung prinsip-prinsip keamanan yang harus diikuti kedua belah pihak untuk berbagi rahasia militer di bawah level 2 mengenai program nuklir dan rudal Korea Utara.[62]

Pakta GSOMIA ini pada awalnya akan ditandangani pada tahun 2012, namun tertunda akibat adanya penolakan keras dari domestik Korea Selatan yang menentang ide tersebut.[63] Penolakan tersebut terjadi dikarenakan rakyat Korea Selatan tidap dapat mempercayai Jepang yang merupakan bekas penjajah negaranya di masa lalu. Namun di bawah pemerintahan Presiden Park Geun Hye, dia melanjutkan negosiasi dan akhirnya pakta GSOMIA ditandatangani oleh Korea Selatan dan Jepang pada 23 November 2016.

Meskipun rakyatnya tidak mempercayai dan membenci Jepang akibat masalah sejarah di masa lalu, pemerintah Korea Selatan memiliki beberapa alasan

[62] Kim Gwanyong, "Korea-Japan Military Agreement... Defense Ministry "Lack of Efforts to Win Public Support Due to Security Urgency", *Naver News*, 23 November, 2016, diakses pada 29 November 2020, https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0003683425?sid=001.

[63] Grace Shaow, "South Korea is Scrapping a Security Deal with Japan - Here's Why It Matters".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bekerja sama dengan Jepang di bidang intelijen militer. Pertama, Jepang sudah mengoperasikan empat satelit intelijen yang dapat memantau bagian utara Semenanjung Korea.[64] Kedua, Jepang juga memiliki kemampuan anti-kapal selam kelas dunia. Hal tersebut berarti penting bagi Korea Selatan karena Korea Utara yang sedang mengembangkan program rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam.[65] Ketiga, gagasan Korea Selatan tersebut didasarkan pada aliansinya dengan Amerika Serikat, yang menganggap Jepang sebagai landasan kebijakan Asia-nya. Sehingga pembuat kebijakan Korea Selatan yang peduli terhadap keamanan nasional mau tidak mau perlu merealisasikan GSOMIA.

Bagi pemerintah Korea Selatan, melindungi keamanan nasional dan memberi rasa aman pada rakyat sebagai tanggapan atas ancaman nuklir dari Korea Utara adalah prioritas utama. Selain itu dibandingkan Korea Selatan, Jepang telah menginvestasikan banyak pengeluaran pertahanan untuk memiliki aset pengawasan dan deteksi yang unggul serta berbagai kemampuan intelijen dan analisis. [66] Karena alasan tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pun menganggap bahwa berbagi informasi secara tepat dengan Jepang akan membantu melacak dan menganalisis lintasan peluncuran rudal balistik Korea Utara dan secara teknis menganalisis kemampuan nuklir Korea Utara.[67] Meskipun begitu, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan juga mengatakan bahwa tidak semua informasi

[64] Jaehan Park dan Sangyoung Yun, “Korea and Japan’s Military Information Agreement: A Final Touch for the Pivot?".

[65] Park Sangbo, "Implications of the General Security of Military Information Agreement for South Korea".

[66] Kim Gwanyong, “Korea-Japan Military Agreement, Defense Ministry: Lack of Efforts to Win Public Support Due to Security Urgency”.

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer akan diberikan tanpa batas kepada Jepang, namun pertukaran informasi rahasia tersebut dilakukan setelah meninjaunya berdasarkan kasus per kasus berdasarkan prinsip timbal balik.[68]

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF JAPAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON THE PROTECTION OF CLASSIFIED MILITARY INFORMATION

The Government of Japan and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties" and separately as "a Party"),

Wishing to ensure the reciprocal protection of Classified Military Information exchanged between the Parties;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
PURPOSE

The Parties shall ensure the protection of Classified Military Information (hereinafter referred to as "CMI") under the terms set forth herein, provided that they are consistent with the national laws and regulations in force of the respective Parties.

ARTICLE 2
DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement,

(a) "CMI" means any defense-related information that is generated by or for the use of or held by the Competent Authorities of the Government of Japan or the Government of the Republic of Korea, and that requires protection in the interests of national security of the respective Parties. The information shall bear a security classification and, where necessary, an appropriate indication to identify such information as CMI. Such information may be in oral, visual, electronic, magnetic, or documentary form, or in the form of equipment or technology;

(b) "Originating Party" means the Party that provides CMI;

(c) "Receiving Party" means the Party that receives CMI provided by the Originating Party;

1

(d) "Competent Authorities" means agencies of a Party which are designated by the Party as authorities responsible for the protection of defense-related information. Each Party shall notify the other Party, through the diplomatic channel, of its Competent Authorities; and

(e) "Personnel Security Clearance" means an eligibility for handling securely CMI granted to individuals in accordance with each Party's appropriate procedures.

Gambar 4.1. Pasal Pertama dan Kedua Pakta GSOMIA

Sumber: *MOFA Japan*[69]

[68] Ibid.

[69] "Agreement Between The Government of Japan And The Government of The Republic of Korea on The Protection of Classified Military Information", *MOFA Japan*, 23 November, 2016, diakses pada 21 Desember 2020, https://www.mofa.go.jp/files/000205833.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data di atas juga didukung oleh pernyataan dari Brendan M. Howe, seorang Profesor Studi Korea. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui email, dia menyatakan bahwa:

> *"Originally signed in 2016, GSOMIA is a bilateral agreement which facilitates intelligence sharing between the two countries and is symbolic of the hope that Seoul and Tokyo can work together to promote shared interests. The agreement provides a direct line for South Korea and Japan to share intelligence on North Korea and other security issues in the region. The pact also helps South Korea and Japan cover gaps in their own intelligence gathering on North Korea, with Japan providing South Korea data on long-range missile tests, while Seoul has human intelligence resources in the North that Tokyo cannot replicate."*[70]

Pada intinya, pakta GSOMIA ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena dapat membantu Korea Selatan dan Jepang melengkapi kekurangan dalam pengumpulan intelijen masing-masing mengenai Korea Utara, dengan Jepang yang menyediakan data tentang uji coba rudal jarak jauh, dan Korea Selatan yang memiliki sumber daya intelijen manusia di Korea Utara yang tidak dapat ditiru oleh Jepang. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan konsep keamanan nasional bahwa negara perlu memanfaatkan *power* dan *resources* yang dimilikinya. Dalam menjaga kedaulatan wilayah, pemerintah Korea Selatan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer yang dimilikinya, namun juga perlu disertai dengan intelijen yang efektif dan dalam hal ini pakta GSOMIA merupakan sebuah perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang dalam bidang berbagi informasi intelijen militer.

[70] Brendan M. Howe, pesan *e-mail* kepada penulis, 9 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemutusan Pakta GSOMIA oleh Korea Selatan

Awal mula dari pemutusan pakta ini sebenarnya disebabkan oleh pertistiwa yang terjadi sejak tahun 2018, saat Mahkamah Agung Korea Selatan menjatuhkan sanksi kepada Japan's Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation dan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. untuk membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabriknya selama penjajahan Jepang.[71] Gugatan tersebut dibawa oleh empat warga Korea Selatan yang bekerja di pabrik baja Jepang antara tahun 1941 hingga 1943. [72] Mereka menggugat perusahaan tersebut ke pengadilan Korea Selatan pada tahun 1997, akan tetapi kasus mereka dibatalkan dengan alasan bahwa baik pengadilan maupun pemerintah Jepang percaya bahwa masalah tersebut cukup diselesaikan dengan kompensasi uang yang dibayarkan Jepang ke Korea Selatan sesuai dalam perjanjian normalisasi antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 1965 yang disebut dengan *Treaty on Basic Relations*.[73] Pada tahun 2005, penggugat mengajukan gugatan lagi pada pengadilan di Korea Selatan dan mosi tersebut pada akhirnya disetujui pada tahun 2012 hingga akhirnya keputusan oleh Mahkamah Agung baru keluar pada tahun 2018.[74] Dari empat warga Korea Selatan yang menggugat, hanya satu orang yang masih hidup datang ke pengadilan untuk mendengarkan hasil suara putusan.[75]

---

[71] "South Korea Court May Rule on Japan firm Asset Sale in Aug. at Earliest".

[72] "South Korea Court Orders Japan's Nippon Steel to Compensate Forced Laborers", *Deutsche Welle*, 30 Oktober, 2018, diakses pada 23 Desember 2020, https://www.dw.com/en/south-korea-court-orders-japans-nippon-steel-to-compensate-forced-laborers/a-46083413.

[73] Ibid.

[74] Ibid.

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Korea Selatan kemudian mengirim dokumen perintah untuk menyita kedua perusahaan Jepang tersebut ke Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai proses pemberitahuan, akan tetapi dokumen tersebut dikirim kembali.[76] Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Korea Selatan, apabila perusahaan menolak untuk membayar kompensasi, maka penggugat berhak memiliki sebagian saham perusahaan di POSCO-Nippon Steel RHF Joint Venture, sebuah usaha patungan dengan pembuat baja Korea Selatan.[77]

Menanggapi itu, Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tersebut tidak masuk akal karena keputusan tersebut dianggap melanggar perjanjian tentang normalisasi hubungan yang ditandatangani kedua negara pada tahun 1965.[78] Selain itu, Perdana Menteri Shinzo Abe juga mengatakan bahwa Jepang mengancam akan merespon dengan tegas kepada Korea Selatan.[79] Pada 4 Juli 2019, Jepang tiba-tiba melakukan pembatasan ekspor bahan semikonduktor pada Korea Selatan. Jepang membatasi ekspor tiga bahan kimia, yaitu poliamid berfluorinasi, fotoresis, dan hidrogen fluorida, yang mana bahan kimia adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat chip komputer, panel layar, dan produk berteknologi tinggi lain yang merupakan produk ekspor utama Korea Selatan.[80]

---

[76] "South Korea Court May Rule on Japan firm Asset Sale in Aug. at Earliest".

[77] “South Korea Court Approves Seizure of Some of Nippon Steel's Assets", *Reuters*, 8 Januari, 2019, diakses pada 23 Desember 2020, https://www.reuters.com/article/us-japan-forcedlabour-southkorea-idUSKCN1P21BB.

[78] “South Korea Court Orders Japan's Nippon Steel to Compensate Forced Laborers".

[79] Ibid.

[80] Mina Pollmann, “What’s Driving Japan’s Trade Restrictions on South Korea?”, *The Diplomat*, 29 Juli, 2019, diakses pada 23 Desember 2020, https://thediplomat.com/2019/07/whats-driving-japans-trade-restrictions-on-south-korea/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korea Selatan melihat bahwa Jepang sengaja melakukan hal tersebut karena bahan kimia polimida dan fotoresis berfluorinasi yang digunakan oleh industri semikonduktor Korea Selatan hampir 100 persen didapatkan dari Jepang, dan bahan kimia hidrogen fluorida sekitar 70 persen juga didapatkan dari Jepang.[81] Secara teknis, pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut bukanlah pembatasan menyeluruh, akan tetapi pembatasan tersebut memberi pemerintah Jepang ruang birokrasi untuk menunda ekspor ke Korea Selatan hingga 90 hari.[82] Kemudian tidak hanya itu, Jepang juga menghapus Korea Selatan dari daftar mitra perdagangan terpercayanya pada bulan Agustus 2019, yang mana hal tersebut mengharuskan adanya penyaringan ketat atas 1.100 barang yang akan diekspor ke Korea Selatan.[83] Pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut memengaruhi industri semikonduktor global Korea Selatan seperti perusahaan Samsung dan SK Hynix. Akan tetapi, Jepang mengklaim bahwa pembatasan ekspor tersebut bukanlah pembalasan atas putusan Mahkmah Agung Korea Selatan, melainkan karena kepentingan keamanan nasional Jepang. Jepang menuduh Korea Selatan menggunakan tiga bahan kimia tersebut untuk membuat senjata militer dan berdasarkan ketentuan ekspor Jepang, hal tersebut dilarang dan juga dianggap menyalahi peraturan internasional.[84]

Menanggapi hal tersebut, Korea Selatan pun juga membalas dengan menghapus Jepang dari daftar mitra perdagangan terbaiknya dan mengajukan

[81] Ibid.
[82] Ibid.
[83] Titli Basu, "Ketegangan Perdagangan Jepang-Korea Selatan".
[84] Mina Pollmann, “What’s Driving Japan’s Trade Restrictions on South Korea?”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komplain ke *World Trade Oganization* (WTO) atas kontrol ekspor dari Jepang itu.[85] Setelah itu, Korea Selatan juga mengancam akan menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang. Pada 21 Agustus, Korea Selatan dan Jepang melakukan pertemuan trilateral di China.[86] Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai perselisihan kontrol ekspor Jepang dengan China sebagai penengahnya. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak berjalan sesuai kemauan masing-masing pihak dan keesokan harinya, Korea Selatan benar-benar melakukan pemutusan pakta intelijen GSOMIA dengan Jepang pada 22 Agustus 2019.[87]

Dikutip dari situs resmi *South Korean Office of the President*, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Hyun Chong Kim berpidato saat pengarahan pers bahwa "keputusan Korea Selatan untuk mengakhiri GSOMIA merupakan hasil dari musyawarah yang ekstensif dan diambil sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan GSOMIA adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi militer yang sensitif berdasarkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua negara. Namun, mengingat klaim Jepang bahwa kepercayaan dasar antara Korea Selatan dan Jepang telah rusak, tidak ada lagi justifikasi bagi Republik Korea untuk mempertahankan GSOMIA lagi.[88]

Mendengar hal tersebut, Amerika Serikat bereaksi dan memberikan komentar bahwa mereka merasa kecewa dengan keputusan Korea Selatan dan terus meminta

---

[85] Hyunjoo Jin, "Seoul to File WTO Complaint over Japan's 'Discriminatory' Export Curbs", *Reuters*, 11 September, 2019, diakses pada 30 Mei 2021, https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-idUSKCN1VW019.

[86] Grace Shaow, "South Korea is Scrapping a Security Deal with Japan - Here's Why It Matters".

[87] Ibid.

[88] Hyun Chong Kim, "Opening Remarks by Deputy National Security Advisor Hyun Chong Kim at Press Briefing", *The Republic of Korea Cheong Wa Dae*, 23 Agustus, 2019, diakses pada 25 Desember 2020, https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korea Selatan untuk mempertimbangkan hal itu kembali sebelum pakta GSOMIA dapat secara resmi dikatakan berakhir pada 23 November 2019 pukul 00.00 am.[89] Amerika Serikat juga terus menekan Korea Selatan di berbagai pertemuannya dengan Korea Selatan. Namun, Presiden Moon Jae-in tidak langsung mengindahkan permintaan Amerika Serikat itu. Pada tanggal 15 November, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong Doo dalam *51st Security Consultative Meeting* di Seoul.[90] Dalam pertemuan tersebut, Mark Esper secara terbuka meminta Korea Selatan untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang. Enam hari kemudian pada tanggal 21 November, Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo melakukan panggilan telepon dengan Menlu Korea Selatan Kang Kyung Hwa.[91] Di panggilan telepon itu, Mike Pompeo juga mendorong Korea Selatan untuk segera mengubah keputusannya dan menegaskan bahwa pakta GSOMIA tersebut penting untuk menyukseskan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat.[92]

Keesokan harinya, pada tanggal 22 November pukul 06.00 pm, Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Kim You Geun mengatakan pada jumpa pers di Pusat Pers Chunchugwan di Cheong Wa Dae, "dengan syarat bahwa pemerintah kami dapat mengakhiri pemberlakuan GSOMIA kapan saja, kami memutuskan untuk

---

[89] Josh Smith dan Hyonhee Shin, "Scrapped Intelligence Pact Draws United States into Deepening South Korea-Japan Dispute", *Reuters*, 29 Agustus, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, https://es.reuters.com/article/idUSKCN1VJ0J6.

[90] Jung Damin, "Criticism Grows over US Pressing Seoul on GSOMIA", The Korea Times, 8 November, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/08/205_278418.html

[91] Motoko Rich dan Edward Wong, "Under U.S. Pressure, South Korea Stays in Intelligence Pact With Japan", *New York Times*, 22 November, 2019, diakses pada 18 Desember 2020, https://www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/japan-south-korea-intelligence.html.

[92] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghentikan keputusan yang dibuat dalam pengumuman sebelumnya untuk mengakhiri perjanjian pada 23 Agustus, dan pemerintah Jepang telah menyatakan pengertiannya".[93] Dia juga menambahkan "Baik pemerintah Korea dan Jepang sepakat untuk mengumumkan pada saat yang sama tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah bilateral yang tertunda. Selama dialog kebijakan bilateral tentang manajemen ekspor dilakukan, untuk sementara Korea Selatan akan menghentikan prosedur petisinya terhadap Jepang ke WTO terkait pembatasan ekspor yang diberlakukan Jepang pada tiga barang ke Korea Selatan".[94]

Dari data literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pembatalan pemutusan pakta GSOMIA oleh Korea Selatan berkaitan dengan konsep keamanan nasional yang dijelaskan oleh Barry Buzan bahwa terdapat lima sektor keamanan, salah satunya adalah militer. Dalam hal ini, pakta GSOMIA adalah sebuah perjanjian dalam bidang intelijen militer dan keputusan Korea Selatan untuk melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang merupakan upaya Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara. Upaya yang dilakukan Korea Selatan ini merupakan bentuk upaya dalam menjaga landasan ideasional dan landasan fisik, yaitu untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan serta keamanan rakyat Korea Selatan.

---

[93] You Geun Kim, "Korea Conditionally Suspends Termination of Military Pact with Japan", *Korea.net*, 22 November, 2019, diakses pada 25 Desember 2020, https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=179694.

[94] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Alasan-Alasan Korea Selatan Tidak Jadi Menarik Diri dari Pakta GSOMIA dengan Jepang

a. Semenanjung Korea Secara Teknis Masih Berperang

Pada akhir Perang Dunia II, Semenanjung Korea yang baru terlepas dari penjajahan Jepang diduduki oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian membagi semenanjung itu menjadi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan.[95] Hal itu disebabkan karena Amerika Serikat yang menguasai Korea bagian Selatan menginginkan agar seluruh Korea bersistemkan demokrasi, sedangkan Uni Soviet yang menguasai Korea bagian utara ingin menerapkan dasar komunisme pada bangsa Korea.[96] Baik Korea Selatan dan Korea Utara menjadi dua negara berdaulat pada tahun 1948 dengan Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Syngman Rhee dan Korea Utara dipimpin oleh Presiden Kim Ilsung dan kedua negara tersebut dibatasi dengan paralel ke-38, yaitu sebuah zona perbatasan yang membagi Semenanjung Korea menjadi dua dan meliputi garis 38 derajat lintang utara.[97]

Berada dalam satu semenanjung yang sama, awalnya kedua negara Korea ini saling mengklaim bahwa negaranya yang merupakan pusat pemerintahan. Pada Desember 1948 dalam Sidang Umum PBB, PBB menyatakan bahwa Korea Selatan adalah pemerintahan yang dianggap sebagai pemerintahan yang sah di Semenanjung dan keputusan tersebut membuat Korea Utara merasa haknya sebagai pemerintahan tidak diakui PBB

[95] Young Ick Lew, *Brief History of Korea.*
[96] Ibid., halaman 25.
[97] Ibid., halaman 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi merasa benci kepada Korea Selatan serta Amerika Serikat yang memiliki peran di balik hal tersebut.[98] Korea Utara pun pada akhirnya meluncurkan Perang Korea dengan memberikan serangan mendadak pada tanggal 25 Juni 1950.[99]

Perang Korea bertahan selama tiga tahun. Pada 27 Juli 1953, para pemimpin militer dari Cina, Korea Utara, dan PBB akhirnya menandatangani gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dan menciptakan batas baru di dekat paralel ke-38 yang memberi Korea Selatan beberapa wilayah tambahan dan membentuk zona demiliterisasi selebar 2,5 mil yang berfungsi sebagai pembatas antara kedua Korea.[100] Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa, dengan sekitar tiga juta orang Korea, baik militer maupun sipil, lebih dari satu juta *volunteer* dari China, dan sekitar 54.000 tentara Amerika tewas di tengah pertempuran itu.[101]

Meski perang sudah berakhir, Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian permanen, sehingga secara teknis saat ini mereka masih berperang. Dengan melihat pada keadaan di semenanjung Korea yang masih tidak menentu, penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan alasan Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019.

---

[98] Sri Suko, *Alchtisar Sedjarah Perang Korea*, (Jakarta: Departen Pertahanan- Keamanan: 1971), dalam Leo Agung, Sejarah Asia Timur 2 (Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2012), halaman 132-134.

[99] Young Ick Lew, *Brief History of Korea*, halaman 27.

[100] Ibid., halaman 29.

[101] Ibid., halaman 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dinamika Ketegangan di Semenanjung Korea Tahun 2016-2019

Ketegangan yang terjadi di antara kedua negara Korea telah berlangsung selama kurang lebih 70 tahun hingga sekarang. Ketegangan yang tak berkunjung mereda tersebut dikarenakan Korea Selatan dan Korea Utara memiliki ideologi yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan. Selain perbedaan ideologi, ketegangan di antara Korea Selatan dan Korea Utara juga dikarenakan program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Keputusan Korea Utara yang menjadi negara yang mengembangkan nuklir membuat ketegangan di Semenanjung Korea makin meningkat.

Disini penulis akan menjelaskan bagaimana dinamika ketegangan yang terjadi di tahun 2016-2019. Pembatasan waktu dari tahun 2016 hingga 2019 ini ialah karena penandatangan GSOMIA terjadi pada tahun 2016 dan keputusan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA terjadi pada tahun 2019. Penulis memandang bahwa pertimbangan untuk melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang tersebut ialah karena Korea Selatan melihat pada bagaimana naik turunnya dinamika ketegangan di Semenanjung Korea sejak pakta GSOMIA ditandatangani pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, hubungan antar dua negara Korea sangatlah dipengaruhi dengan adanya program nuklir Korea Utara. Dalah waktu setahun, Korea Utara menunjukkannya dengan jelas bahwa pengembangan program misil dan nuklir merupakan prioritas utama mereka. Hal itu ditunjukkan dengan dua uji coba nuklir yang pertama kalinya dilakukan oleh Korea Utara di tahun yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uji coba nuklir pertama Korea Utara di tahun 2016 pertama dilakukan pada awal Januari. Pada pukul 10.30 pagi tanggal 6 Januari, seismograf di Institut Nasional China dan Korea Selatan mendeteksi gempa bumi di timur laut Korea Utara, tepatnya di lokasi nuklir Punggye-ri, Korea Utara.[102] Pada tanggal 7 Februari, Korea Utara meluncurkan satelit ke orbit, yang mana hal itu juga melanggar resolusi PBB dan menentang peringatan dari komunitas internasional.[103] Korea Utara bersikeras bahwa program luar angkasanya murni bersifat ilmiah, tetapi Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga China menganggap peluncuran itu bertujuan untuk mengembangkan rudal balistik antar benua.[104]

Menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang membahayakan, Dewan Keamanan PBB pada 2 Maret 2016 mengeluarkan Resolusi 2270 Dewan Keamanan PBB, yang mana resolusi tersebut disahkan dengan suara bulat oleh lima Dewan Keamanan Tetap PBB yang mewajibkan bagi semua negara untuk memeriksa setiap kargo yang datang dari atau pergi ke Korea Utara dan larangan perdagangan dengan Korea Utara dalam sumber daya alam, termasuk beberapa produk ekspor utama seperti batubara dan bijih besi.[105] Namun delapan bulan kemudian, Korea Utara melakukan uji coba nuklir lagi pada 9 September 2016. Uji coba tersebut menyebabkan ledakan berkekuatan

---

[102] Marco Milani, "Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis", *The Journal of the Italian Think Tank on Asia*, (2018): 91, diakses pada 4 Desember 2020, https://www.asiamaior.org/files/04%20Asia%20Maior%202016%20Korean%20Peninsula.pdf.

[103] "North Korea fires long-range rocket despite warnings", *BBC*, 7 Februari, 2016, diakses pada 5 Desember 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-35515207.

[104] "North Korean Satellite is in Orbit, Says South", *BBC*, 9 Februari, 2016, diakses pada 5 Desember 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-35529588.

[105] Marco Milani, "Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5,3 skala Richter dan terjadi di daerah Punggye-ri, sama seperti tempat uji coba sebelumnya. Kebanggaan Korea Utara atas uji coba nuklir tersebut seakan menantang sanksi internasional dan tekanan diplomatik yang sudah berlangsung lama untuk mengekang ambisi nuklirnya. Hal itu pun menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain. Kekhawatiran tersebut lah yang pada akhirnya membuat Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Park Geun Hye menandatangani pakta GSOMIA dengan Jepang pada 23 November 2016.

Pada tahun berikutnya di tahun 2017, tindakan Korea Utara masih tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dan dapat dikatakan lebih berani. Dalam pidato tahun baru tahunannya pada 1 Januari, Kim Jong-un memuji kemajuan senjata nuklir negaranya dan mengatakan negara itu berada dalam tahap akhir persiapan untuk menguji rudal balistik antarbenua.[106] Dalam setahun itu, Korea Utara berhasil meluncurkan sejumlah 16 rudal balistik[107], yang diluncurkan dalam waktu sembilan bulan mulai dari 12 Februari hingga yang terakhir pada 29 November. Selain keenam belas uji peluncuran rudal tersebut, Korea Utara juga melakukan uji coba nuklir keenamnya dalam sejarah pada 3 September yang menyebabkan gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter dan lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan oleh Amerika

[106] Mark E. Manyin, *North Korea: A Chronology of Events from 2016 to 2020*, (USA: Library of Congress, 2020), diakses pada 11 Desember 2020, https://www.everycrsreport.com/files/20200505_R46349_6307d94932ea867fd6c287e740681164c6f83bd3.pdf.

[107] "North Korea Missile Activity in 2017", *Center for Arms Control and Non-Poliferation*, 30 November, 2017, diakses pada 8 Desember 2020, https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-north-korea-missile-activity-2017/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat di Hiroshima dan Nagasaki selama perang dunia kedua.[108] Nuklir itu diterbangkan mengikuti jalur vertikal yang tinggi hingga 960 km dan mencapai ketinggian maksimum 4.500 km, yang jika ditembakkan pada lintasan standar, nuklir tersebut sudah dikatakan bisa terbang hingga 13.000 km (8.077 mil) dan mencapai daratan Amerika Serikat.[109]

Tindakan Korea Utara yang terus memprovokasi Amerika Serikat tersebut menempatkan Korea Selatan dalam kegelisahan tersendiri. Di sisi lain, Korea Selatan bersama dengan Amerika Serikat sama-sama menginginkan denuklirisasi Korea Utara. Namun di sisi lain, berdamai dengan Korea Utara adalah prioritas juga bagi Korea Selatan. Korea Selatan sendiri dengan tegas mengatakan bahwa mereka telah menawarkan "masa depan yang cerah" bagi Korea Utara jika mau menghentikan provokasinya dan datang ke meja dialog. Namun tindakan Korea Utara yang terus melanjutkan provokasi membuat Korea Selatan tidak punya banyak pilihan selain membangun sistem pertahanannya lebih lanjut.

Jika pada tahun 2017 Semenanjung Korea penuh dengan konflik, tahun 2018 sangatlah berbeda. Dalam Pidato Tahun Baru tahun 2018, Kim Jong Un mengatakan bahwa "(Korea Utara) harus mengurangi ketegangan militer yang akut antara Korea Utara dan Selatan dan menyediakan lingkungan yang

---

[108] "North Korea Nuclear Crisis: Putin Warns of Planetary Catastrophe", *The Guardian*, 5 September, 2017, diakses pada 8 Desember 2020, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/south-korea-minister-redeploying-us-nuclear-weapons-tensions-with-north.

[109] Clint Work, "North Korea's Latest Missile Test and South Korea's Response", *The Diplomat*, 2 Desember, 2017, diakses pada 8 Desember 2020, https://thediplomat.com/2017/12/north-koreas-latest-missile-test-and-south-koreas-response/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai di Semenanjung Korea. Korea Utara dan Selatan harus secara luas mengadakan kontak, kunjungan, kerja sama, dan pertukaran di antara mereka, menyelesaikan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan satu sama lain, dan memenuhi tanggung jawab dan peran mereka sebagai kekuatan utama dalam reunifikasi"[110]. Pidato Kim Jong Un tersebut merupakan awal perubahan dari ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea selama setahun penuh di tahun 2017.

Andrei Lankov, seorang ahli Rusia yang terkenal dalam studi Korea, berpendapat bahwa kebijakan sanksi yang keras dan isolasi internasional lah yang memaksa Kim Jong Un untuk mengambil langkah berbeda pada tahun 2018.[111] Selain itu, China yang merupakan sekutu terdekat Korea Utara juga ikut memberikan sanksi dengan melarang impor mineral, batu bara, produk laut, pakaian, dan lainnya. [112] Karena Korea Utara perlu menghindari kemungkinan krisis ekonomi di negaranya, maka mereka perlu berhenti melakukan uji coba rudal dan nuklir.

Bagaimanapun, salah satu alasan menghangatnya suasana di Semenanjung tersebut adalah karena usaha dari Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang baru menjabat pada Mei 2017 di Korea telah melakukan negosiasi tidak resmi di belakang layar dengan Korea Utara. Beberapa usaha yang dilakukan Korea Selatan adalah sebagai berikut: 1) Mengajak Korea Utara berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin

[110] Mark E. Manyin, *North Korea: A Chronology of Events from 2016 to 2020*.
[111] Ibid., halaman 53.
[112] Lee Chanwoo, "Future Outlook for the Korean Peninsula Situation", *Special Article* 4 (2018), 49, https://www.jef.or.jp/journal/pdf/221st_Special_Article_04.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pyeongchang dan membiayai sebesar $2.652.000, 2) Menunda latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, 3) Mengizinkan saudara perempuan Kim Jong Un menghadiri olimpiade, dan 4) Melakukan pertemuan dengan ketua Presidium Tertinggi Korea Utara, Kim Yong Nam[113]. Olimpiade Musim Dingin yang dilaksanakan di Pyeongchang tahun 2018 lalu itu telah menjadi ajang dialog antara kedua Korea.

Pada 5 Maret 2018, Moon Jae-in mengirim Kepala Direktorat Keamanan Nasional Jong Yi Yong ke Pyongyang untuk melakukan pertemuan dengan Kim Jong Un.[114] Dari kunjungan tersebut, Jang Yi Yong mengatakan bahwa Kim Jong Un menyatakan kesiapannya untuk denuklirisasi dengan syarat jaminan keamanan dan menyatakan keinginan berdialog dengan Amerika Serikat untuk menjalin hubungan bilateral dan membahas masalah nuklir-rudal.[115] Selama masa negosiasi, Korea Utara juga berjanji tidak akan melakukan uji coba nuklir.[116] Selain itu, kedua negara juga bersepakat untuk melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Panmunjom pada 27 April 2018.

KTT di Panmunjom tersebut merupakan KTT ketiga antar Korea sepanjang sejarah. Pada KTT tersebut, kedua Korea membahas mulai dari masalah denuklirisasi di Semenanjung Korea, pengakhiran perang dan

---

[113] Kan Den Sik, "Korean Peninsula Problem in the Light of the Latest Events", *Journal of Ukrainian Policymaker Vol*. 3 (2018), 52, https://www.researchgate.net/publication/330148296_Korean_Peninsula_Problem_in_the_Light_of_the_Latest_Events.

[114] Ibid., halaman 53.

[115] Ibid., halaman 53.

[116] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea, pembukaan saluran komunikasi permanen antara Selatan dan Utara, reuni keluarga yang terpecah, hingga rencana pengembangan hubungan antar-Korea.[117] KTT ketiga ini melahirkan Deklarasi Panmunjom, yang mana disitu kedua negara Korea sepakat memberikan komitmen mereka untuk segera mengakhiri perpecahan dan konfrontasi yang telah berlangsung lama, untuk membuka era baru rekonsiliasi nasional, perdamaian dan kemakmuran, serta untuk meningkatkan dan memupuk hubungan antar-Korea secara lebih aktif. Dalam deklarasi tersebut, kedua negara Korea menyatakan bahwa: 1). Kedua belah pihak akan menyambung kembali hubungan darah bangsa dan memajukan kemakmuran bersama dan reunifikasi independen yang dipimpin oleh dua negara Korea, 2) Kedua belah pihak akan melakukan upaya bersama untuk meredakan ketegangan militer yang akut dan secara substansial menghilangkan bahaya perang di semenanjung Korea, dan 3). Kedua belah pihak akan secara aktif bekerja sama untuk membangun rezim perdamaian yang permanen dan stabil di semenanjung Korea.[118]

Seusai deklarasi, Korea Selatan dan Korea Utara sudah benar-benar menerapkan ketentuan dalam Deklarasi Panmunjom tersebut. Dalam hal langkah membangun kepercayaan militer, keduanya telah melakukan operasi ranjau, membentuk zona larangan terbang, dan menghancurkan 20 pos

[117] Ibid., halaman 55.

[118] "Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula (2018.4.27)", *MOFA ROK*, 11 September, 2018, diakses pada 11 Desember 2020, http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjaga di DMZ.[119] Dalam hal kerja sama ekonomi, Korea Selatan mendapatkan pembebasan sanksi PBB untuk survei bersama kereta api antar-Korea, dan memulai survei 18 hari di bagian utara jalur kereta api.[120] Dalam hal momentum dan kemajuan, semua langkah tersebut mempersulit keduanya untuk kembali bersikap tegang seperti tahun-tahun sebelumnya dan seakan memberi harapan bahwa denuklirisasi kemungkinan dapat dilakukan dan perjanjian damai dapat terus dipertahankan.

Politisi, ilmuwan, hingga jurnalis yang melihat perubahan situasi di Semenanjung ini kemudian memberikan komentar bahwa apabila kehangatan ini dapat dijaga dan berkelanjutan, maka hal itu benar-benar bisa berkembang menjadi proses penghapusan pengoperasian senjata nuklir di Semenanjung Korea dan menjadi salah satu tahapan reunifikasi damai Korea. Namun Menteri Luar Negeri China Wang Yi berasumsi bahwa bagaimanapun negosiasi denuklirasi Korea Utara akan menjadi sulit, karena Kim Jong Un pasti tidak akan menyerah begitu saja pada senjata nuklir, sebab dirinya juga tidak akan mudah untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkannya sebagai balasannya.[121]

Di tahun 2018, KTT *inter-Korea* dilaksanakan hingga tiga kali. Ketiga KTT tersebut meningkatkan ekspektasi bagi tiap pihak yang bersangkutan

---

[119] Ji Dagyum, "UN Sanctions Committee Allows Seoul to Resupply Northern Military Hotline", *NK News*, diakses pada 13 Desember 2020, https://www.nknews.org/2018/11/un-sanctions-committee-allows-seoul-to-resupply-northern-military-hotline/.

[120] Ankit Panda, "Inter-Korean Rail Survey Begins, Ahead of Expected Fourth Kim-Moon Summit", *The Diplomat*, 30 November, 2018, diakses pada 13 Desember 2020, https://thediplomat.com/2018/12/inter-korean-rail-survey-begins-ahead-of-expected-fourth-kim-moon-summit-in-seoul/.

[121] Ibid., halaman 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga menantikan sesuatu yang lebih akan terjadi pada tahun berikutnya. Namun nyatanya, tahun 2019 tidaklah demikian. Selama bulan-bulan pertama tahun 2019, hubungan antar-Korea tampak berjalan di jalur positif. Pada 17-18 Januari 2019, Kim Yong Chol, utusan dari Korea Utara melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Presiden Trump.[122] Pada hari kedua kunjungan tersebut, Gedung Putih mengumumkan bahwa kedua negara akan melaksanakan KTT yang kedua pada akhir Februari. Dalam pidato kenegaraannya tanggal 5 Februari, Trump mengumumkan bahwa KTT tersebut akan berlangsung di Vietnam pada 27 -28 Februari.[123] Dalam hal ini, Korea Selatan tampak menantikan KTT Hanoi tersebut dengan harapan tinggi karena apabila pertemuannya berjalan lancar, denuklirisasi mungkin dapat dilaksanakan dan hubungan antar-Korea dapat terus membaik.

Namun nyatanya, KTT Korea Utara dan Amerika Serikat di Hanoi tersebut mengalami kebuntuan. Korea Utara ingin agar Amerika Serikat mengangkat sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, namun Amerika Serikat sendiri tak mau melakukannya apabila Korea Utara tidak melakukan denuklirisasi secara total.[124] Bagaimanapun, kapabilitas nuklir memang

---

[122] Mark Landler dan David E. Sanger, “Trump and Kim Jong-un to Hold Second Summit Meeting Next Month”, *The New York Times*, 18 Januari, 2019, diakses pada 13 Desember 2020, https://www.nytimes.com/2019/01/18/us/politics/trump-kim-summit.html.

[123] “State of the Union: Trump Announces Second North Korea Summit”, *BBC News*, 6 Februari, 2019, diakses pada 13 Desember 2020, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47139969.

[124] Tong Hyung Kim, "South Korean President Moon Calls for 4th Summit With Kim Jong Un", *The Diplomat*, 16 April, 2019, diakses pada 2 Juni 2021, https://thediplomat.com/2019/04/south-korean-president-moon-calls-for-4th-summit-with-kim-jong-un/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hal yang bisa Kim Jong Un serahkan begitu saja dengan mudah. Kebuntuan KTT Korea Utara-Amerika Serikat di Hanoi tersebut memberikan dampak pada Korea Selatan. Setelah terlihat jelas bahwa pertemuan itu menunjukkan kegagalan dalam mencapai kemufakatan, saham Korea Selatan turun drastis.[125]

Dalam upaya menghidupkan kembali pembicaraan Amerika Serikat-Korea Utara dan untuk mendapatkan kembali peran mediator antara kedua pihak, Moon Jae-in melakukan pertemuan dengan Trump di Washington pada 11 April.[126] Namun upaya diplomatik tersebut tidak disambut baik oleh Kim Jong Un, yang mengharapkan agar Korea Selatan dapat bersikap lebih independen untuk memenuhi deklarasi Panmunjom. Sekembalinya ke Korea Selatan, pada 15 April, Moon mengusulkan gagasan pertemuan puncak keempat dengan Kim Jong Un untuk memecahkan kebuntuan diplomatik saat di Hanoi dan untuk menghidupkan kembali momentum untuk dialog antar-Korea namun gagasan itu tidak didengar oleh Korea Utara.[127]

Hubungan antar-Korea juga mulai memburuk segera setelahnya. Pada Mei 2019, Korea Utara mulai melakukan uji coba peluncuran dua rudal balistik, yang mana peluncuran tersebut merupakan uji coba rudal balistik

---

[125] Lim Sojin, "North Korea-US Summit: What Its Failure Means for The Peninsula's Future", *The Conversation*, 28 Februari, 2019, diakses pada 13 Desember 2020, https://theconversation.com/north-korea-us-summit-what-its-failure-means-for-the-peninsulas-future-112634.

[126] "Trump to meet with South Korea's Moon on April 11 at White House", *Reuters*, 29 Maret 2019, diakses pada 2 Juni 2021, https://www.reuters.com/article/uk-northkorea-usa-trump-southkorea-idUKKCN1RA06F.

[127] Kim Tong Hyung, "South Korean President Moon Calls for 4th Summit With Kim Jong Un".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama sejak November 2017[128]. Kim Jong Un sendiri juga terlihat kembali fokus pada ekonomi mandirinya dan terus meningkatkan kerjasama ekonomi dengan mitra tradisionalnya seperti Rusia dan China. [129] Hal itu terbuktikan dengan empat kali pertemuan antara Korea Utara-China dan kunjungan Kim Jong Un yang pertama ke Rusia semenjak dirinya menjadi presiden.[130] Semua pertemuan tersebut terjadi di paruh pertama tahun 2019.

Dengan melihat pada dinamika ketegangan yang tidak fluktuatif di antara Korea Selatan dan Korea Utara sejak pakta GSOMIA ditandatangani pada tahun 2016, serta dengan melihat pada sikap Korea Utara yang tidak dapat ditebak dan masih menjadi ancaman bagi Korea Selatan, penulis memandang bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada bulan November 2019.

c. Nuklir Korea Utara Merupakan Ancaman Bersama bagi Korea Selatan dan Jepang

Selama ini, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang terlihat seperti hubungan yang ‘dekat tapi jauh’. Kedua negara ini berdekatan secara geografis, namun penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945 telah meninggalkan luka yang dalam dan selalu menjadi topik yang tampaknya menyakitkan bagi kebanyakan orang Korea. Di awal

---

[128] Michelguglielmo Torri dkk., *Asia in 2019: Escalating International Tensions and Authoritarian Involution*, (Italia: Viella Libreria Editrice, 2019), diakses pada 13 Desember 2020, https://www.asiamaior.org/files/AM2019_Korea.pdf, halaman 110.

[129] Michelguglielmo Torri dkk., *Asia in 2019: Escalating International Tensions and Authoritarian Involution*, halaman 95.

[130] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaannya, Korea Selatan pernah menolak hubungan diplomatik dan kerjasama perdagangan dengan Jepang. Setelah pembebasan Korea Selatan dari Jepang pada tahun 1945, kedua negara hidup dalam isolasi satu sama lain. Namun untuk pertama kalinya, kedua negara melakukan negosiasi untuk melakukan kerjasama pada tanggal 15 Februari 1952.[131] Negosiasi tersebut berlanjut dengan berulang kali mengalami penangguhan hingga tahun 1965 dan pada akhirnya, setelah saling membenci selama dua dekade pasca Perang Dunia II, Korea Selatan dan Jepang menandatangani perjanjian yang disebut dengan *Treaty on Basic Relations* pada 22 Juni 1965 di Tokyo.[132] Perjanjian tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang ditandatangani antara dua negara pada *Japan-Korea Annexation Treaty* di tahun 1910 adalah tidak berlaku lagi.[133] Akan tetapi, meskipun perjanjian sudah ditandangani dan kerjasama sudah mulai dibangun, hubungan Korea Selatan-Jepang tetaplah rapuh. Hingga sekarang, Korea Selatan dan Jepang memiliki masalah bilateral yang belum dapat terselesaikan. Beberapa masalah yang sering kali menjadi sumber ketegangan di antara keduanya adalah masalah sejarah di masa penjajahan Jepang dan masalah sengketa wilayah pulau Dokdo/Takeshima.

Namun, ancaman nuklir dari Korea Utara menghadirkan peluang bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang. Selama masa Perang Dingin, ancaman

---

[131] Gorkemde, "Normalization of relations between South Korea and Japan", *Shrimp Among Whales*, 16 Agustus, 2016, diakses pada 15 Desember 2020, https://shrimpamongwhales.com/2016/08/16/normalization-of-relations-between-south-korea-and-japan/.

[132] Ibid.

[133] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer Korea Utara membuat kedua negara harus membentuk aliansi tidak resmi melalui aliansi bilateral mereka dengan Amerika Serikat. Meskipun saat itu kedua negara tidak memiliki perjanjian pertahanan resmi, namun strategi pertahanan nasional Korea Selatan dan Jepang terkait erat dengan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi konflik di Semenanjung Korea. Saat Perang Korea terjadi, Jepang berperan penting dalam menyediakan pangkalan militer dan dukungan logistik dalam membantu pasukan PBB di bawah komando Amerika Serikat dalam mempertahankan Korea Selatan dan melawan Korea Utara serta sekutu-sekutunya.

Program nuklir yang dikembangkan Korea Utara pada tahun 1990-an, menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Jepang dan Korea Selatan. Ancaman bersama tersebut membuat Korea Selatan dan Jepang melakukan negosiasi trilateral dengan Amerika Serikat melalui pertemuan *Trilateral Coordination and Oversight Group* (TCOG) yang secara khusus dibentuk untuk mengkoordinasikan kebijakan yang efektif dalam menghadapi Korea Utara.[134]

Selain trilateralisme itu, Korea Selatan dan Jepang juga menandatangani pakta GSOMIA pada 23 November 2016. Dikutip dari portal berita resmi Korea.net, dalam wawancaranya dengan Lee Young-chae, seorang profesor dari Universitas Keisen Tokyo, Lee Young Chae mengatakan bahwa "Penembakkan rudal balistik jarak menengah

[134] Seongho Sheen, *Japan-South Korea Relations: Slowly Lifting the Burden of History?*, (USA: APCSS, 2003), diakses pada 15 Desember 2020, https://apcss.org/Publications/Ocasional%20Papers/OPJapanSouthKoreaRelationsSheen(final-10.26.03).pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taepodong-1 oleh Korea Utara pada tahun 1998 membuat Jepang berada dalam jangkauan rudal Korea Utara. Hal tersebut merubah pandangan Jepang terhadap Korea Utara. Jadi, berbagi informasi intelijen dengan Korea Selatan melalui GSOMIA adalah penting untuk menjaga keamanan nasional Jepang".[135] Pada akhirnya, keamanan nasional dan ancaman bersama antara Korea Selatan dan Jepang itulah yang membuat dua negara yang sebenarnya saling membenci ini mau tak mau harus meneruskan kerjasama dan mempertahankan aliansi demi melindungi keamanan dan pertahanan negara masing-masing.

d. Hubungan Kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat

Keberhasilan Korea Selatan menjadi negara maju seperti saat ini tidak terlepas dari bantuan Amerika Serikat. Ketika pasukan Amerika menduduki Korea Selatan pada tahun 1945, situasi ekonomi Korea Selatan sangatlah suram sebagai akibat dari kebijakan kekaisaran Jepang selama akhir Perang Dunia II dan pembagian semenanjung yang tiba-tiba. [136] Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 malah makin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Amerika Serikat yang memihak pada Korea Selatan pun memberikan program bantuan ekonomi besar-besaran ke Korea Selatan. Dari tahun 1953 hingga 1960, Korea Selatan menerima banyak sekali bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, dengan total tahunan terkadang melebihi $300 juta yang diperuntukkan untuk menyediakan bantuan makanan, membangun kembali

[135] Lee Young Chae, wawancara oleh Korea.net, 31 Oktober 2019.

[136] Gregg Brazinsky, "US-South Korea Relations", *Wilson Center Digital Archive*, diakses pada 15 Desember 2020, https://digitalarchive.wilsoncenter.org/resource/modern-korean-history-portal/us-south-korea-relations-1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

infrastruktur, membangun sekolah baru, dan melatih personel Korea Selatan dalam bidang administrasi dan teknis lainnya.[137]

Bantuan ekonomi Amerika tersebut sangatlah berperan penting dalam membantu Korea Selatan untuk bertahan di masa-masa yang sangat sulit dalam sejarahnya. Awalnya, bantuan tersebut tidak merangsang pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan Amerika Serikat. Sepanjang tahun 1950-an, kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Syngman Rhee sangatlah kacau karena dia sering mengalihkan bantuan Amerika untuk mendukung kroni politiknya.[138] Selain itu, Syngman Rhee juga tidak mendengarkan nasihat ekonomi dari Amerika untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Jepang, sebuah langkah yang menurut Amerika Serikat sangat penting bagi masa depan ekonomi Korea Selatan.[139] Akibatnya, meski ekonomi Korea Selatan berhasil pulih dari perang, Korea Selatan tetap tidak berkembang.

Situasi ekonomi di Korea Selatan tersebut mulai berubah selama tahun 1960-an setelah Park Chung Hee merebut kekuasaan dalam kudeta militer dan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama Korea Selatan[140]. Pada tahun 1963, Korea Selatan dan Amerika Serikat bekerja sama erat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Korea Selatan. Dengan dukungan Amerika, pemerintahan Park Chung Hee dapat menerapkan berbagai reformasi yang berguna seperti meningkatkan

[137] Ibid.
[138] Ibid.
[139] Ibid.
[140] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan pajak dan menaikkan suku bunga.[141] Reformasi itu menciptakan sumber modal baru yang dapat diinvestasikan dalam infrastruktur. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga menerapkan kegiatan ekspor dalam kegiatan ekonominya untuk mengejar model pembangunan. Hasilnya adalah pada akhir 1960-an, Korea Selatan berhasil menjadi lebih mandiri dan kurang bergantung pada bantuan Amerika untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.[142]

Selama tahun 1970-an, Korea Selatan menjadi makin lebih mandiri. Korea Selatan meluncurkan inisiatif baru yang mendorong perusahaan Korea untuk pindah ke industri berat seperti baja, mobil, perkapalan dan elektronik. Inisiatif tersebut sangatlah membuahkan hasil yang sangat bagus dan perusahaan-perusahaan tersebut sangatlah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.[143] Beberapa perusahaan tersebut banyak yang masih eksis hingga sekarang, seperti Hyundai, LG, Samsung, SK Group, dan masih banyak lagi.

Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat terus-menerus menekan pemerintah Korea Selatan untuk memperbaiki iklim investasi asing. Korea Selatan melakukan denasionalisasi bank komersialnya dan menerapkan reformasi yang mengurangi peran negara dalam keputusan investasi.[144] Kebijakan tersebut pada akhirnya mempermudah Korea Selatan untuk

[141] Ibid.
[142] Ibid.
[143] Ibid.
[144] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik investasi asing dan berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat sepanjang tahun 1980-an dan awal 1990-an.[145]

Meskipun perekonomian Korea Selatan juga mengalami kesulitan sebagai akibat dari krisis di Asia pada tahun 1997, Korea Selatan masih dapat bangkit kembali dengan mendapat bantuan dari Amerika juga. Pada awal milenium baru, ekonomi Korea Selatan tumbuh lagi dan kemitraan ekonominya dengan Amerika Serikat terus menguat. Dan kini, Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar bagi satu sama lain. Baik Korea Selatan maupun Amerika Serikat juga merupakan negara dengan ekonomi besar sedunia.

Tidak hanya beraliansi di bidang ekonomi, kedua negara ini tentunya juga beraliansi di bidang keamanan militer. Aliansi militer Amerika Serikat-Korea Selatan sudah muncul sejak masa Perang Korea. Selama perang, pasukan Korea Selatan ditempatkan di bawah kendali operasional Komando PBB yang dipimpin Amerika. Di akhir perang, Amerika Serikat dan Korea Selatan menandatangani sebuah perjanjian bernama *Mutual Defense Treaty* yang mana menurut ketentuan perjanjian itu, Amerika Serikat berkomitmen untuk membela Korea Selatan dari segala serangan.[146]

Mutual Defense Treaty tersebut memiliki beberapa implikasi penting. Berdasarkan pernjanjian itu juga, Amerika Serikat memperoleh hak untuk mendirikan pangkalan militer di Korea Selatan dan menempatkan

[145] Ibid.
[146] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasukannya di sana.[147] Pada saat itu, Amerika Serikat menempatkan 720.000 tentara di sana untuk membantu pertahanan Korea Selatan.[148] Amerika Serikat juga memikul tanggung jawab untuk melatih dan mendukung pasukan Korea Selatan. Selama tahun 1950-an, Amerika Serikat memberi pemerintah Syngman Rhee bantuan militer hingga ratusan juta dolar, memasok sebanyak 87 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan negara.[149]

Selama tahun 1960-an, ketika ancaman invasi Korea Utara menjadi mulai hilang, aliansi tersebut mulai terlibat dalam kemitraan yang tidak hanya terkait langsung dengan masalah semenanjung, tetapi juga dalam masalah keamanan regional. Contohnya seperti keputusan Korea Selatan untuk membantu upaya tempur Amerika di Vietnam dengan mengirim lebih dari 300.000 tentara pada tahun 1965-1973.[150] Sebagian penghargaan kepada Korea Selatan atas partisipasinya di Vietnam, Amerika Serikat memberikan dukungan program senilai $1,5 miliar untuk memodernisasi pasukan Korea Selatan pada tahun 1971-1975.[151] Dengan program itu, Amerika Serikat berharap Korea Selatan dapat meningkatkan pertahanannya dengan sejumlah kecil pasukan Amerika. Dan pada saat ini, hanya terdapat sekitar 28.500 pasukan Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan.[152]

---

[147] Ibid.
[148] Ibid.
[149] Ibid.
[150] Ibid.
[151] Ibid.
[152] Natasha Khairunisa Amani, "Korea Selatan Setujui Pembayaran Pasukan Militer AS di Wilayahnya", Liputan6, 8 Maret 2021, diakses pada 13 Juni 2021, https://www.liputan6.com/global/read/4501441/korea-selatan-setujui-pembayaran-pasukan-militer-as-di-wilayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh Amerika sangatlah luas dan hampir hadir di setiap aspek kehidupan Korea Selatan. Selama bertahun-tahun, aliansi militer, kemitraan ekonomi, dan hubungan politik yang erat telah menjadikan Amerika Serikat sebagai faktor yang tak terhindarkan dalam menentukan arah peristiwa di Korea Selatan. Tak lain juga dalam peristiwa saat Korea Selatan memutuskan untuk tidak akan melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang, yang mana keputusan itu sangatlah mengecewakan Amerika Serikat dan membuat Amerika Serikat terus menekan Korea Selatan agar segera berdamai dengan Jepang. Di sisi lain, Korea Selatan juga masih tetap membutuhkan pasukan Amerika Serikat untuk membantu berjaga di zona demiliterisasi. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa hubungan Korea Selatan yang terikat erat dengan Amerika Serikat itulah yang membuat Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

D. Konfirmasi Teoritik Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dengan Konsep Keamanan Nasional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab II, Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan nasional berkaitan dengan kemampuan negara untuk mempertahankan identitas independen mereka untuk melawan sebuah kekuatan yang mereka anggap sebagai ancaman. Negara diasumsikan menghadapi ancaman ketika salah satu dari ketiga komponennya terganggu, yaitu kedaulatan wilayah, lenbaga-lembaga negara yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terjaminnya ketertiban,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.[153] Barry Buzan juga mengatakan bahwa terdapat lima sektor keamanan yaitu politik, militer, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.[154]

Selama ini, salah satu tantangan terbesar yang perlu dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan adalah kesejahteraan dan keselamatan masyarakatnya dari ancaman militer nuklir Korea Utara sebagai implikasi dari perang Korea tahun 1950-1953 silam. Dalam hal ini, Korea Selatan melihat bahwa menjaga keamanan negara serta melindungi rakyatnya dari ancaman nuklir adalah sutau hal yang prioritas, sehingga melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, penulis juga melihat bahwa melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah bentuk upaya Korea Selatan dalam memegang kuat cita-cita negaranya sebagai negara yang berdaulat yang dapat melindungi komponen-komponen penting bagi sebuah unit negara, salah satunya rakyat.

Keamanan nasional memang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari ketakutan dak kecemasan, negara perlu memanfaatkan *power* dan *resources* yang dimilikinya. Tiap negara membutuhkan tentara yang kuat dan aktif disertai dengan intelijen yang efektif, sistem hukum yang baik, keamanan siber, dan kebijakan imigrasi untuk melindungi tanah air dan mengamankan perbatasan negara. Dalam hal ini, Korea Selatan adalah negara kaya dengan kapabilitas militernya yang tergolong kuat. Pada tahun 2019, Korea Selatan

[153] Barry Buzan, *People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations.*

[154] Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkedudukan di peringkat 7 dari 138 negara dalam hal kekuatan militernya.[155] Korea Selatan memiliki total personel militer lebih dari lima juta tentara, 406 pesawat tempur, 2.654 tank tempur, dan anggaran pertahanan hingga $38,3 miliar per tahunnya.[156]

Di bawah pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan telah berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan pertahanan Korea Selatan. Sejak tahun 2018, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mencanangkan rencana yang disebut dengan *Defence Reform* 2.0, yang mana hal itu bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi peningkatan militer Korea Selatan.[157] Reformasi pertahanan Korea Selatan tersebut perlu diiringi dengan adopsi teknologi mutakhir seperti *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) yang berguna untuk melengkapi kurangnya fasilitas pelatihan, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Internet of Things* (IoT) untuk mengatur sistem pertahanan dengan lebih baik.[158] Untuk reformasi yang ambisius tersebut, Korea Selatan perlu meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan, rencana *Defence Reform* 2.0 itu adalah rencana jangka menengah yang dimulai pada tahun 2019-2023 dan memerlukan alokasi dana sebesar $242 miliar.[159] Namun, anggaran pertahanan sebesar $242 miliar tersebut tidaklah

---

[155] "GFP Power Ranking Index of Nations Since 2005", *Global Fire Power*, diakses pada 16 Desember 2020, https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp.

[156] Ellen Loanes, "These are the 25 Most Powerful Militaries in the World in 2019", *Business Insider*, 27 September, 2019, diakses pada 16 Desember 2020, https://www.businessinsider.nl/most-powerful-militaries-in-the-world-ranked-2019-9.

[157] Seong Ho Sheen, "South Korea's Overdue Defence Reforms", *East Asia Forum*, 29 Mei, 2019, diakses pada 16 Desember 2020, https://www.eastasiaforum.org/2019/05/29/south-koreas-overdue-defence-reforms/.

[158] Ibid.

[159] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah, terutama dengan biaya jaminan sosial yang meningkat pesat dan pertumbuhan ekonomi yang lamban di bawah pemerintahan Moon Jae-in sekarang ini.

Menurut data yang dirilis oleh Bank Korea pada kuartal pertama tahun 2019, *Gross Domestic Product* (GDP) Korea Selatan hanya tumbuh 1,8% jika dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,8 persen.[160] Penurunan itu juga sangat signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 3,1 persen pada kuartal keempat di tahun 2018.[161] Oleh karena itu, penulis memandang bahwa hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Korea Selatan tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA.

Selagi pemerintah Korea Selatan memikirkan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya, memutuskan pakta GSOMIA dengan Jepang akan menjadi kesulitan tambahan bagi Korea Selatan. Bagaimanapun, pakta GSOMIA ini sangat berguna dalam mempertahankan keamanan nasional Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara. Sebab melalui pakta tersebut, Korea Selatan dapat menerima informasi penting dari Jepang mengenai kegiatan nuklir Korea Utara. Belum lagi, hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat juga akan terdampak apabila Korea Selatan benar-benar memutuskan pakta.

Selain itu, kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional harus dilihat sebagai sesuatu yang saling menguatkan dan menyeimbangkan satu sama lain dalam merancang strategi keamanan nasional. Dalam hal ini, kebijakan Korea Selatan

---

[160] Steven Burke, "Korea: Economic Growth Plunges to a Near-Decade Low", *Focus Economics*, 25 April, 2019, diakses pada 15 Desember 2020, https://www.focus-economics.com/countries/korea/news/gdp/economic-growth-plunges-to-a-near-decade-low.
[161] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memutuskan untuk tidak jadi berhenti melanjutkan GSOMIA adalah sebuah strategi dalam menguatkan dan menyeimbangkan pertahanan nasional negaranya. Dengan melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang, hal ini membuktikan bahwa keamanan nasional tidak cukup dengan hanya memiliki tentara kuat serta keamanan siber dan keamanan imigrasi saja, kemampuan intelijensi yang efektif juga diperlukan untuk melindungi tanah air dan perbatasan Korea Selatan.

E. Konfirmasi Teoritik Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dengan Teori Kebijakan Luar Negeri

Rosenau mengatakan dalam bukunya yang berjudul "The Study of World Politics" bahwa terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri.[162] Variabel pertama adalah individu dari pembuat kebijakan. Variabel individu ini mencakup semua aspek pembuat kebijakan, mulai dari nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki pembuat kebijakan, yang dapat membedakan perilaku kebijakan luar negerinya dari setiap pembuat keputusan lainnya.[163] Dalam penelitian ini, individu yang akan dianalisis perilakunya adalah Presiden Moon Jae-in karena keputusan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019 terjadi di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in.

Moon Jae-in adalah presiden Korea Selatan yang ke-12. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjadi aktivis dan pengacara HAM. Moon Jae-in memulai karirnya di bidang politik pada tahun 2012, saat dia memenangkan kursi di Majelis

[162] Rosenau, "The Study of World Politics", halaman 171.
[163] Ibid, halaman 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional yang mewakili distrik Sasang di Busan. Selain itu, dia juga mencalonkan diri sebagai presiden mewakili *Democratic United Party* melawan Park Geun Hye dari *Saenuri Party*. Dalam pemilihan presiden itu, Moon Jae-in kalah tipis dari lawannya namun dia tetap aktif bekerja sebagai politikus di tingkat nasional dan partai. Pada Februari 2015, dia diangkat sebagai ketua penerus Partai Demokratik Liberal Korea.

Pada 2017, Presiden Park Geun Hye tersandung skandal pemerasan terhadap perusahaan konglomerat di Korea. Ketika detail skandalnya terungkap, para demonstran menyerukan pengunduran diri Park Geun Hye dan melakukan protes jalanan terbesar sejak Korea mengalami demokratisasi. Park Geun Hye pun resmi dimakzulkan dari kursi kepresidenannya pada 10 Maret 2017 dan pemakzulan tersebut memicu terjadinya pemilihan umum awal yang pada akhirnya membuat Moon Jae-in menjadi presiden Korea Selatan yang berikutnya.

Moon Jae-in dilantik pada 10 Mei 2017, namun ia langsung mendapat cobaan pertamanya dengan adanya uji coba rudal balistik Korea Utara pada 14 Mei. Pada bulan Juni, Korea Selatan melakukan pengujian rudal balistik jarak pendek Hyunmoo-2C, yang dikatakan dapat mencapai target manapun di Korea Utara.[164] Moon Jae-in sendiri hadir dalam peluncuran itu untuk mengawasi dan setelah peluncuran tersebut berhasil, dia berkata “Saya percaya pada dialog, tetapi saya

[164] Joseph Trevithick, "South Korea Tests Ballistic Missile That Can Hit Anywhere Inside North Korea", *The Drive*, 23 Juni, 2017, diakses pada 17 Desember 2020, https://www.thedrive.com/the-war-zone/11823/south-korea-tests-ballistic-missile-that-can-hit-anywhere-inside-north-korea.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga paham bahwa dialog bisa dilakukan apabila kita memiliki pertahanan nasional yang kuat".[165]

Dari perkataannya tersebut, penulis memandang bahwa Moon Jae-in adalah pemimpin yang logis dan rasional. Berbeda dengan presiden sebelumnya yang bersikap keras menghadapi Korea Utara dengan memberi sanksi, Moon Jae-in bersikap lebih terbuka dan menginginkan dialog dengan Korea Utara. Namun, ia meyakini bahwa Korea Selatan hanya dapat melakukan dialog dengan Korea Utara apabila Korea Selatan juga memiliki rudal dengan kemampuan yang sepadan dengan Korea Utara. Keinginannya untuk berdialog pun juga berhasil terwujud di tahun 2018, yang mana pada saat itu lahirlah sebuah Deklarasi Panmunjom dan terlaksananya KTT antar-Korea untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2007.

Sikap Moon Jae-in yang logis dan rasional juga ditunjukkannya lagi pada saat Jepang memberlakukan pembatasan ekspor ke Korea Selatan pada tahun 2019, yang mana hal tersebut menyebabkan Korea Selatan menyatakan bahwa mereka ingin memutuskan pakta GSOMIA dengan Jepang pada Agustus 2019. Pada 4 Juli, Jepang memberlakukan pembatasan ekspor tiga bahan kimia yang mana bahan tersebut adalah bahan penting bagi produksi semikonduktor dan smartphone yang merupakan ekspor utama Korea Selatan.[166] Jepang mengatakan bahwa pengontrolan ekspor tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran keamanan nasional bahwa bahan kimia tersebut bisa digunakan sebagai pembuatan senjata militer. Namun, Moon Jae-in meyakini bahwa pengontrolan tersebut dilakukan sebagai

[165] Ibid.

[166] Yonhap, "S. Korea Renews Call for Japan to Lift Exports Curbs ", *Korea Herald*, 12 Mei, 2020, diakses pada 17 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20200512000810.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembalasan atas keputusan Mahkamah Agung Korea yang menjatuhi sanksi kepada dua industri Jepang agar membayar kompensasi terhadap warga Korea Selatan yang telah dipaksa bekerja di pabriknya selama masa penjajahan Jepang.

Presiden Moon Jae-in mengatakan negaranya tidak dapat berbagi informasi militer dengan negara yang memperketat kontrol ekspor atas masalah keamanan.[167] Ucapan Moon Jae-in tersebut menunjukkan bahwa dia adalah orang yang logis dan rasional dalam mengambil keputusan. Moon Jae-in juga menambahkan "Bukankah bertentangan untuk berbagi informasi militer sambil mengatakan Korea Selatan tidak dapat dipercaya dalam hal keamanan?"[168]

Sifat dan sikapnya yang logis dan rasional itu juga diakui oleh orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan dan kepribadian Moon Jae-in, sebuah Media Korea Hankyoreh pernah mewawancarai orang-orang yang bekerja dengannya di Blue House saat dia masih menjadi bagian dari staff kepresidenan Roh Moo Hyun. Oh Min Soo, rekan sekretaris urusan sipil Presiden Moon dulu, mengatakan pada media bahwa "Dia selalu membutuhkan alasan logis dan justifikasi atas tindakannya. Dia juga tidak membiarkan urusan pribadinya bercampur dengan urusan negara".[169]

Tiga hari sebelum Korea Selatan memutuskan untuk tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA, Moon Jae-in mengatakan bahwa "pemerintah akan mencoba sampai akhir untuk menghindari penghentian kesepakatan dengan Jepang tentang

---

[167] Aoki Yoshiyuki, "What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?".

[168] Yonhap, "Moon Vows to Maintain Security Cooperation with Japan Despite Looming GSOMIA Expiry", Korea Herald, 20 November, 2019, diakses pada 17 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20191120000089.

[169] Seong Han Yong, "Moon Jae-In's Leadership in Depth", *Hankyoreh*, 7 Desember, 2012, diakses pada 18 Desember 2020, english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/564273.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukaran informasi militer, tetapi itu tergantung pada sikap Jepang terkait pembatasan ekspornya terhadap Korea".[170] Pada 22 November 2020 pukul 6 p.m, melalui staff kepemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk tidak jadi mengakhiri GSOMIA secara bersyarat dengan Jepang dan bahwa pemerintah Jepang telah menyatakan pengertiannya.[171]

Penulis memandang bahwa keputusan Moon Jae-in untuk meneruskan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah bentuk konsistensinya dalam bersikap logis dan rasional dalam memutuskan suatu kebijakan. Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Erwin Tan, seorang profesor Studi Korea. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, ia menyatakan bahwa

> *"He (Moon Jae-in) initially took a tough line against Japan as a form of brinkmanship in trying to coerce Japan into addressing the ROK's anger over the issue of Japanese colonial exploitation of Korea; when the Japanese made their defiance clear, Moon decided not to carry through with this threat because of the recognition that, strains in ROK-Japan relations, North Korea was the real enemy."*[172]

Keputusan yang dilakukan oleh Moon Jae-in menunjukkan pengakuannya bahwa terlepas dari ketegangan di antara Korea Selatan dan Jepang, musuh sebenarnya adalah tetap Korea Utara. Penulis juga memandang bahwa sikapnya yang konsisten tersebut didapatkannya dari pengalaman dan bakatnya sebagai seorang pengacara sebelum ia mulai masuk ke dunia politik.

---

[170] "President Moon Hosts Town Hall Meeting Televised Live", *The Republic of Korea Cheong Wa Dae*, 20 November, 2019, diakses pada 25 Desember 2020, https://english1.president.go.kr/Media/News/652.

[171] Kim You Geun, "Korea conditionally suspends termination of military pact with Japan"

[172] Erwin Tan, pesan *e-mail* kepada penulis, 10 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berarti membenarkan penyataan Rosenau dalam bukunya bahwa variabel individu mencakup karakteristik, nilai, bakat, dan pengalaman dari sang pembuat kebijakan. Keputusan Moon Jae-in yang tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang adalah termasuk bentuk kepeduliannya juga terhadap rakyat Korea Selatan. Moon Jae-in melihat bahwa menjaga keamanan negara serta melindungi warganya dari ancaman nuklir Korea Utara adalah sutau hal yang prioritas. Dalam sebuah wawancara sebelum dia menjabat menjadi presiden, saat ditanyai bagaimana dia memandang kemampuan kepemimpinannya sendiri, dia menjawab "Kim Dae-jung adalah orang yang sangat rasional, tapi dia selalu setengah langkah di depan rakyat. Saya pikir itu pendekatan yang bagus. Tapi saya ingin melakukan reformasi kuat tidak hanya melalui kalkulasi logis, namun melalui berjalan dan berbicara dengan rakyat."[173] Jawabannya dalam wawancara dengan salah satu media Korea tersebut menunjukkan bahwa Moon Jae-in adalah seorang yang begitu memikirkan rakyat dalam melakukan urusan negara.

Selain melihat pada karakteristik Moon Jae-in, penulis juga melihat pada partai politik yang menaungi Moon Jae-in. Sebab, keputusan yang dibuat presiden biasanya mewakili kepentingan partai politiknya. Partai politik Moon Jae-in adalah *Democratic Party* yang merupakan bagian dari kubu progresif. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang konservatif, yang 'Pro-Amerika' dan 'Anti-Korea Utara', progresif malah menganggap Korea Utara adalah negara kerabat yang akan diajak berdamai dan cenderung melihat Amerika Serikat sebagai perusak potensial

[173] Seong Han Yong, "Moon Jae-In's Leadership in Depth".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rekonsiliasi antar-Korea.[174] Namun meski begitu, progresif masih menghargai bagaimana aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Berdasarkan karakteristik dari progresif tersebut, penulis membenarkan bahwa variabel individu memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan bahkan dapat menjadi kekuatan utama di panggung global. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana Moon Jae-in yang melakukan usaha yang besar dalam mengajak Korea Utara untuk berdialog. Pada saat dirinya mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA pun, Moon Jae-in tidak langsung mendengarkan. Namun dikarenakan adanya banyak pertimbangan, mulai dari kepentingan keamanan nasional dan demi melindungi rakyatnya dari ancaman yang tidak pasti dari Korea Utara, Moon Jae-in pun akhirnya mengubah keputusannya dan meminta staff kepresidenannya untuk mengumumkan bahwa Korea Selatan akan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

Variabel kedua adalah peran. Variabel peran ini berkaitan dengan peranan yang ditempati oleh para pengambil keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan jabatannya, tanpa memperhatikan karakteristik individunya.[175] Dalam kasus yang terjadi di Korea Selatan ini, peranan tersebut ditempati oleh Jeong Kyeong Doo, Menteri Pertahanan Korea Selatan tahun 2019 dan Kang Kyung Hwa, Menteri Luar Negeri Korea Selatan. Kedua menteri tersebut memiliki peran penting dalam

---

[174] Haesook Chae dan Steven Kim, *Conservatives and Progressives in South Korea*, (Washington: The Washington Quarterly, 2008), diakses pada 21 Desember 2020, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/twq08autumnchaekim.pdf.

[175] Rosenau, "The Study of World Politics", halaman 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan kebijakan luar negeri karena sebelum Korea Selatan memutuskan untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang karena keduanya telah beberapa kali dalam pertemuan internasional untuk melakukan negosiasi terkait pakta GSOMIA.

Seperti yang disudah penulis pada penyajian data sebelumnya, pemutusan pakta GSOMIA pada Agustus 2019 adalah implikasi dari perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang. Perang dagang tersebut dimulai oleh Jepang yang membatasi ekspor bahan utama semikonduktor ke Korea Selatan di bulan Juli 2019. Menanggapi pembatasan ekspor tersebut, Menteri Luar Negeri Kang Kyung Hwa menemui Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono pada pertemuan ASEAN *Foreign Minister* di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, Kang Kyung Hwa mengancam jika Jepang mencabut Korea Selatan dari daftar mitra perdagangan terpercayanya, Korea Selatan akan membuat tindakan balasan dan memperingatkan itu akan mempengaruhi kerjasama keamanan di antara keduanya.[176] Namun sehari setelah pertemuan itu, Jepang tetap menghapus Korea Selatan dari daftar mitra perdagangan terpercayanya, yang mana itu menyebabkan adanya penyaringan ketat atas barang yang akan diekspor ke Korea Selatan dari Jepang. Pada 12 Agustus, Korea Selatan pun membalas dengan menghapus Jepang dari daftar mitra perdagangan terpercayanya juga.[177] Pada 21 Agustus, Korea Selatan dan Jepang bertemu kembali pada pertemuan trilateral dengan China. Dalam pertemuan

[176] Hyonhee Shin, "South Korea-Japan Talks Falter Ahead of Decision on Favored-Trade List", *Reuters*, 1 Agustus, 2019, diakses pada 18 Desember 2020, https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan/south-korea-japan-talks-falter-ahead-of-decision-on-favored-trade-list-idUSKCN1UR39K.

[177] Rina Ayu Larasati, "Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trilateral itu, sengketa dagang antara keduanya juga dibahas dengan China berperan sebagai mediator. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak berjalan sesuai kemauan masing-masing pihak dan keesokan harinya, Korea Selatan benar-benar melakukan pemutusan pakta intelijen GSOMIA dengan Jepang pada 22 Agustus 2019. Namun, pemutusan tersebut baru bisa dikatakan resmi berakhir pada 23 November 2019. Amerika Serikat yang kecewa dengan keputusan itu pun terus mendesak Korea Selatan untuk mempertimbangkan kembali sebelum pakta GSOMIA secara resmi berakhir pada 23 November.[178]

Bulan-bulan berikutnya, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang makin memanas. Akan tetapi pada 4 November, Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Jeong Kyeong Doo mengutarakan pendapatnya di pertemuan komite pertahanan bahwa Korea Selatan harus mempertahankan pakta GSOMIA dengan Jepang demi kepentingan keamanan nasional.[179] Dia mengatakan berulang kali pada parlemen betapa pentingnya kerjasama bilateral itu dengan Jepang, namun juga menambahkan bahwa masalah pembatasan ekspor Jepang juga harus diselesaikan.[180]

Tidak hanya Menteri Pertahanan Nasional, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung Hwa juga mengatakan perkataan yang serupa. Pada 8 November, dia mengatakan pada anggota parlemennya bahwa kemungkinan penghentian pakta intelijen militer GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang dapat

---

[178] Josh Smith dan Hyonhee Shin, "Scrapped Intelligence Pact Draws United States into Deepening South Korea-Japan Dispute"

[179] "Defense Minister: GSOMIA Should Be Kept If It Helps Security", *KBS World Radio*, 4 November, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149109.

[180] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan Korea Utara dan China.[181] Kang Kyung Hwa memahami bahwa keputusan awal untuk memutuskan pakta adalah keputusan yang tak terhindarkan karena sengketa perdagangan dan sejarah yang terjadi, namun dia juga menambahkan bahwa konsekuensi tambahan dari pemutusan pakta adalah dapat membebani penanganan hubungan diplomatik lainnya[182], yang mana maksudnya adalah hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan mendapat masalah. Kang Kyung Hwa juga menegaskan kembali bahwa Korea Selatan dapat mempertimbangkan kembali keputusannya tentang pemutusan pakta hanya apabila Jepang membatalkan pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan.[183]

Dari apa yang diucapkan oleh Menteri Pertahanan Nasional dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan itu, penulis memandang bahwa kedua menteri tersebut tidak hanya memperingatkan Jepang untuk segera membatalkan pembatasan ekspornya kepada Korea Selatan, namun sebagai pejabat pemerintahan yang secara langsung berurusan dengan pengambilan kebijakan luar negeri, mereka juga mengingatkan pemerintah Korea Selatan bahwa pakta intelijen GSOMIA itu penting dan harus dilanjutkan terlepas dari apapun itu untuk melindungi keamanan nasional.

Bentuk ucapan yang dilontarkan kedua menteri tersebut menunjukkan bahwa variabel peran yang ditempati oleh Menteri Kang Kyung Hwa dan Menteri Jeong Kyeong Doo ini memiliki peranan dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri berdasarkan jabatannya masing-masing. Dan salah satu bukti yang membenarkan

---

[181] Yonhap, "FM Sees Point in Claims GSOMIA Termination Could Benefit NK, China", *The Korea Herald*, 8 November, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20191108000616.

[182] Ibid.

[183] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan tersebut adalah tawaran dari Jepang yang akan mempertimbangkan kembali kontrol ekspornya,[184] dengan mengajak Korea Selatan untuk melakukan dialog kebijakan tingkat tinggi untuk mengulas masalah pembatasan ekspor dari Jepang tersebut,[185] yang mana keputusan Jepang tersebut tentunya diambil setelah berulang kali melakukan pertemuan serta negosiasi dengan Korea Selatan.

Variabel ketiga adalah sosial. Variabel ini terdiri dari aspek-aspek nonpemerintah dari suatu masyarakat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Seperti yang sudah dijelaskan di bab II, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi dengan lingkungan internal negara dan salah satunya adalah opini publik. Dalam kasus Korea Selatan ini, peran opini publik Korea Selatan memang sangat dirasakan kehadirannya. Hal itu dibuktikan dengan peristiwa gagalnya penandatanganan GSOMIA di bawah pemerintahan Lee Myung Bak pada tahun 2012 karena isu *Comfort Women* yang sangat kontroversial.

Comfort Women adalah sebutan halus untuk wanita yang memberikan layanan seksual kepada tentara Jepang di masa penjajahan Jepang.[186] Banyak dari wanita-wanita tersebut yang menderita penyakit fisik seperti mandul, penyakit psikologis, dan bahkan mendapat penolakan dari keluarga mereka.[187] Pada bulan Desember 2011, para aktivis *Comfort Women* mendirikan patung seorang gadis yang mereka sebut *peace monument* di luar kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul

---

[184] Yoo Kang Moon, "S. Korea Succumbs to US Pressure to Extend GSOMIA", *Hankyoreh*, 25 November, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/918428.html.

[185] Aoki Yoshiyuki, “What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?”.

[186] Ami Lynch, "Comfort Women", *Britannica*, 6 Juni, 2019, diakses pada 19 Desember 2020, https://www.britannica.com/topic/comfort-women.

[187] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangun di depan Kedubes Jepang di Seoul yang dibangun sebagai bentuk pengingat Jepang atas korban budak seks.[188]

Gambar 4.2. Patung Wanita di Depan Kedubes Jepang di Korea Selatan

Sumber: BBC[189]

Ketika pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk tidak melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang pada bulan Agustus, banyak masyarakat yang menunjukkan persetujuannya dengan keputusan pemerintahan tersebut. Dalam *polling* yang dilakukan oleh media Korea YTN *News* pada 23 Agustus 2019 dan diikuti oleh 10.685 masyarakat Korea Selatan dari seluruh negeri, 54,9% responden mengatakan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang baik, 38,4% mengatakan itu keputusan yang buruk, dan sisanya 6,7% memilih tidak merespon.[190]

Sekitar 16 hari menjelang pengumuman dilanjutkannya pakta GSOMIA oleh pemerintah, media YTN *News* kembali mengadakan *polling* dan itu diikuti oleh

---

[188] "Comfort Women: Japan and South Korea Hail Agreement", *BBC*, 28 Desember 2015, diakses pada 19 Desember, 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-35190464.

[189] Ibid.

[190] "The End of GSOMIA: 55% Good Decision VS 38% Bad Decision", *Realmeter*, 26 Agustus 2019, diakses pada 19 Desember 2020, www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-잘한-결정-55-vs-잘못한-결정-38/?ckattempt=1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8,595 masyarakat Korea Selatan dari seluruh negeri. Hasilnya, 48,3 persen responden setuju agar GSOMIA tetap diakhiri, 37,6 persen memilih agar GSOMIA diperpanjang, dan sisanya 14, 1 persen memilih tidak merespon.[191] *Polling* kedua diadakan lagi pada 15 November 2019, diikuti oleh 10.454 masyarakat Korea Selatan dari selutuh negeri, dengan 55,4 persen responden memilih agar GSOMIA diakhiri, 33,2 persem memilih agar GSOMIA diperpanjang, dan 11,4 persen memilih tidak merespon.[192]

Polling-polling tersebut memang tidak dapat dikatakan bisa mewakili seluruh opini publik Korea Selatan, namun masyarakat Korea Selatan yang anti-Jepang memang nyata ada dan jumlah pendukungnya tidaklah sedikit. Pada Juni 2020 lalu saja, aktivis *Comfort Women* masih melakukan protes di depan Kedubes Jepang.[193] Jepang memang sudah memberikan kompensasi uang terhadap korban *Comfort Women*, namun hal yang dituntut oleh para korban dan pendukung aktivisme tersebut adalah permintaan maaf tulus Jepang secara langsung.

Pada tahun 2013, Jepang pernah terlibat kontroversi atas komentar walikotanya yang mengatakan bahwa “sistem *comfort women* dibutuhkan untuk

---

[191] "Decision to End GSOMIA: 48% Keeping VS 38% Canceling", *Realmeter*, 7 November 2019, diakses 19 Desember 2020, www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-결정-유지-48-vs-철회-38/.

[192] "Decision of GSOMIA Termination, 48% → 55% VS 38% → 33%", Realmeter, 18 November 2020, diakses pada 19 Desember 2020, www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-결정-유지-48→55-vs-철회-38→33/

[193] Yoon Sojung, "Weekly Protest in Seoul for 'Comfort Women' Victims Marks 28th Anniversary", *Korea*, 9 Juni, 2020, diakses pada 19 Desember 2020, https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=181462#none.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan waktu istirahat pada tentara yang berperang".[194] Pernyataan tersebut membangkitkan luka bagi para korban dan makin menarik banyak simpati dari masyarakat internasional terhadap para korban yang masih terus memperjuangkan apa yang ingin didapatkannya sebagai korban. Tidak hanya karena masalah *Comfort Women* saja, sikap anti-Jepang masyarakat Korea Selatan ini juga disebabkan persengketaan Korea Selatan dan Jepang selama lebih dari 300 tahun atas pulau Dokdo yang terletak di sebelah timur Semenanjung Korea, merupakan pulau yang dijaga ketat oleh polisi Korea Selatan, yang mana Jepang juga mengklaim bahwa pulau tersebut adalah bagian dari teritorialnya dan menyebutnya sebagai pulau Takeshima.[195]

Sentimen anti-Jepang yang kuat di Korea Selatan tersebut memang terlihat kontradiktif dengan keputusan pemerintah Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang. Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan sendiri juga mengakui bahwa kerjasama intelijen dengan Jepang tidak mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Namun mereka memiliki perspektif sendiri dan mengatakan bahwa "bagi Kementerian Pertahanan Nasional, keamanan nasional dan perlindungan kehidupan rakyat adalah prioritas utama dalam menanggapi ancaman musuh yang semakin meningkat".[196]

---

[194] Toko Sekiguchi, "Osaka Mayor Stirs Anger by Calling Comfort Women Necessary Evil", *Wall Street Journal*, 14 Mei, 2013, diakses pada 19 Desember 2020, https://www.wsj.com/articles/BL-JRTB-13873.

[195] Alexandra Genova, "Two Nations Disputed These Small Islands for 300 Years", *National Geographic*, 14 November, 2018, diakses pada 19 Desember 2020, https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/asia/south-korea/history-dispute-photos-dodko-rocks-islands/.

[196] Yang Sae Rom, "From Re-implementation of the Controversial Korea-Japan Military Information Agreement to the Final Signing", *News 1*, 23 November, 2011, diakses pada 19 Desember 2020, https://n.news.naver.com/article/421/0002409353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut mengkonfirmasi pernyataan Rosenau dalam bukunya bahwa opini masyarakat dapat menentukan suatu kebijakan luar negeri dan jika opini masyarakat terbelah menjadi dua atau lebih, potensi variabel sosial ini akan makin memiliki peran penting karena hal tersebut membuat pejabat kebijakan luar negeri semakin sulit untuk memobilisasi dukungan yang memadai untuk kebijakan mereka. Bagaimanapun dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan pakta GSOMIA sebab rasa takut dan rasa tegang yang dialami masyarakat Korea Selatan selama berpuluh-puluh tahun setidaknya dapat diatasi melalui upaya berbagi informasi intelijen militer dengan Jepang terkait dengan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

Variabel keempat adalah sistemik. Variabel ini mencakup aspek nonmanusiawi yang dapat mempengaruhi pilihan dalam membuat kebijakan luar negeri, seperti aliansi, geografi, ideologi, ekonomi, dan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis memandang bahwa aspek yang mempengaruhi keputusan Korea Selatan untuk tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA adalah faktor aliansinya dengan Amerika Serikat. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa bagi Amerika Serikat, penandatanganan pakta GSOMIA itu penting untuk memastikan bahwa kedua mitra terdekat Amerika Serikat di Asia bisa saling bekerjasama.

Sehari setelah Korea Selatan mengumumkan akan memutuskan pakta GSOMIA dengan Jepang, Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan pada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Kanada bahwa Amerika Serikat merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecewa dengan keputusan yang dibuat Korea Selatan itu.[197] Dia juga menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mendesak Korea Selatan dan Jepang untuk terus melakukan dialog, karena GSOMIA itu berharga tidak hanya dalam kaitannya dengan Korea Utara, namun juga untuk seluruh dunia.[198]

Menghadapi komentar Mike Pompeo tersebut, Menlu Korea Selatan Kang Kyung Hwa mengatakan kepada Duta Besar Amerika Serikat Harry Harris untuk tidak mengungkapkan keprihatinannya secara terbuka, namun Amerika Serikat malah tidak ragu-ragu dalam melakukannya. Amerika Serikat menggunakan berbagai cara, termasuk melalui Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan, untuk menekankan pentingnya pakta GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang sebagai komponen kunci dari Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menyatakan bahwa penghentian GSOMIA akan menguntungkan Korea Utara, China, dan Rusia. Dari sini, penulis memandang bahwa kepentingan keamanan Korea Selatan memang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan keamanan Amerika Serikat, karena kedua negara ini telah memiliki hubungan yang dalam sejak akhir masa Perang Dunia II.

Tekanan dari Amerika Serikat juga ditunjukkan melalui pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong Doo dalam *51st Security Consultative Meeting* di Seoul pada 15 November 2019. Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Moon Jae-in. Sebelum pertemuan, Mark Esper secara terbuka mengatakan kepada wartawan

---

[197] Yonhap, "US Expresses 'Strong Concern,' 'Disappointment' at Termination of Seoul-Tokyo Intel Pact", *Korea Rehald*, 23 Agustus, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20190823000106.

[198] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dirinya akan terus mendorong Korea Selatan untuk merubah keputusannya agar tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.[199] Pada hari pertemuan, Presiden Moon Jae-in menjelaskan perspektif Korea Selatan mengenai GSOMIA bahwa sulit untuk berbagi intelijen militer dengan Jepang karena Jepang memberlakukan pembatasan ekspor dengan alasan tidak dapat mempercayai Korea di bidang keamanan. Dikutip dari situs *South Korean Office of the President*, Mark Esper menyetujui hal tersebut dan mengatakan bahwa dia memahami dengan baik masalah yang terkait dengan GSOMIA serta akan meminta Jepang untuk melakukan bagiannya juga agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lancar.[200]

Tak hanya dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga melakukan penekanan dengan melakukan panggilan telepon dengan Menlu Korea Selatan Kang Kyung Hwa tepat satu hari sebelum pakta GSOMIA dapat dikatakan resmi berakhir dan mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat perlu bekerjasama dalam menyukseskan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat.[201] Sebab, Amerika Serikat memandang bahwa pakta GSOMIA tersebut tidak hanya terkait pertukaran informasi mengenai program rudal dan nuklir Korea Utara, namun juga kemampuan militer China yang berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir.[202]

---

[199] Jung Damin, "Criticism Grows over US Pressing Seoul on GSOMIA".

[200] "The President Meets with U.S. Secretary of Defense Mark Esper", *The Republic of Korea Cheong Wa Dae*, 15 November, 2019, diakses pada 25 Desember 2020, https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/467.

[201] Motoko Rich dan Edward Wong, “Under U.S. Pressure, South Korea Stays in Intelligence Pact With Japan”.

[202] Abraham M. Denmark, "The U.S.-ROK Alliance and Policy Coordination Toward China", *Council on Foreign Relations*, 19 Maret, 2019, diakses pada 20 Desember 2020, https://www.cfr.org/blog/us-rok-alliance-and-policy-coordination-toward-china.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tekanan-tekanan dari Amerika Serikat tersebut merupakan salah satu bentuk faktor yang menyebabkan Korea Selatan tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang pada November 2019 lalu. Penulis memandang Korea Selatan menyadari bahwa mengakhiri GSOMIA dengan Jepang tidaklah memberikan keuntungan diplomatik bagi mereka, karena hal itu dapat memberikan sebuah kesempatan bagi aliansi Korea Utara-China untuk menyebarkan perselisihan antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang sudah membangun aliansi sejak lama. Di sisi lain, Korea Selatan juga masih memerlukan bantuan tentara Amerika Serikat untuk membantu menjaga zona demiliterisasi. Dengan meneruskan pakta GSOMIA yang juga penting sebagai komponen kunci strategi Indo-Pasifik, maka Amerika Serikat memiliki kemungkinan akan memikirkan ulang tentang permintaannya yang menuntut Korea Selatan untuk membayar lebih atas tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan.

Variabel kelima adalah pemerintah. Variabel ini mengacu pada aspek-aspek struktur pemerintah, seperti hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, apakah saling membatasi atau mendorong dalam pemutusan kebijakan luar negeri. Lembaga legislatif di Korea Selatan sendiri terdiri dari Majelis Umum yang terdiri dari 300 anggota tetap dan memiliki masa jabatan empat tahun.[203] Majelis Umum adalah lembaga yang mewakili pendapat rakyat Korea Selatan dan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.[204] Sedangkan untuk lembaga eksekutif,

[203] "Government of South Korea", *New World Encyclopedia*, 8 Juli, 2017, diakses pada 21 Desember 2020, https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Government_of_South_Korea.
[204] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpin langsung oleh presiden dan terdiri dari menteri beserta kabinet-kabinetnya. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Dalam undang-undang Korea Selatan, masa jabatan presiden adalah lima tahun dan hanya satu masa jabatan. Presiden Korea Selatan memiliki wewenang untuk mengusulkan undang-undang ke Majelis Nasional.[205]

Dalam bertugas, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif terkadang mengalami perbedaan pendapat. Hal tersebut dikarenakan lembaga legislatif merupakan wakil dari partai politik dan dalam menjalankan tugasnya, dia pasti akan bekerja mewakili kepentingan partainya. Demikian pula dengan lembaga eksekutif, meski presiden adalah pilihan rakyat, namun presiden juga diusung oleh sebuah partai politik atau gabungan beberapa partai politik sehingga kebijakan yang dikeluarkannya akan cenderung berpihak pada kepentingan partai politik yang mengusungnya. Maka apabila seorang presiden dari suatu partai politik terpilih, maka mayoritas kursi Majelis Nasional yang ada sebaiknya ditempati oleh anggota yang bernaung di bawah partai politik yang sama dengan presiden atau setidaknya memiliki pemahaman yang sama dengan presiden. Karena jika terdapat kasus dimana presiden ingin mengusulkan sebuah undang-undang, maka mayoritas anggota Majelis Nasional, dengan partai politik yang sama atau dengan pemahaman yang sama, akan dapat dengan mudah mengesahkan undang-undang tersebut.

Di Korea Selatan, partai politik cenderung diklasifikasikan menjadi dua kubu, yaitu konservatif dan progresif. Perpecahan antara konservatif dan progresif tersebut sebenarnya adalah hal yang baru di Korea Selatan. Sebelumnya,

[205] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman konservatif sangatlah mendominasi dunia perpolitikan di Korea Selatan karena pemahaman tersebut memiliki pengertian 'Pro-Amerika' dan 'Anti-Korea Utara'. Dominasi pemahaman konservatif tersebut disebabkan oleh adanya ancaman dari Korea Utara pasca Perang Korea yang menjadikan partai politik korservatif seakan merupakan satu-satunya partai yang sah dan memonopoli politik di Korea Selatan.[206] Namun, terpilihnya Presiden Roh Moo-hyun pada 2002, yang telah berjanji selama kampanyenya untuk tidak bersujud ke Amerika Serikat, menandai berakhirnya monopoli konservatif dan naiknya kaum progresif.[207]

Di Korea Selatan, ketidakselarasan antara eksekutif dan legislatif dapat dilihat dari peristiwa penandatanganan pakta GSOMIA yang gagal di bawah pemerintahan Lee Myung Bak pada tahun 2012. Pada saat itu, Lee Myung Bak diklaim telah berusaha melakukan penandatanganan secara sembunyi-sembunyi tanpa membahasnya terlebih dahulu dengan Majelis Nasional Korea Selatan. Kabinet Presiden Lee Myung Bak menganggap bahwa lembaga eksekutif tidak berkewajiban untuk melaporkan kepada Majelis Nasional jika perjanjian tersebut hanya berupa berbagi informasi militer yang bersifat dasar.[208] Namun pada nyatanya, perjanjian tersebut mengharuskan kedua negara untuk berbagi informasi terkait pertahanan yang "memerlukan perlindungan untuk kepentingan keamanan nasional masing-masing pihak"[209], yang mana hal tersebut menyiratkan bahwa

---

[206] Haesook Chae dan Steven Kim, "Conservatives and Progressives in South Korea".

[207] Chaibong Hahm, *The Two South Koreas: A House Divided*, (Washington: The Washington Quarterly, 2005), diakses pada 21 Desember 2020, https://doi.org/10.1162/0163660054026515.

[208] Seongho Sheen dan Jina Kim, "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact", *Asia Pacific Bulletin* No. 176, (2012), 2, https://www.files.ethz.ch/isn/152657/apb176.pdf.

[209] "Agreement Between the Government of Japan and the Government of the Republic of Korea on the Protection of Classified Military Information".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang dibagi kedua negara adalah informasi yang sangat penting dan rahasia. Maka apabila merujuk pada undang-undang di Korea Selatan, perjanjian tersebut perlu mendapat ratifikasi dari Majelis Nasional terlebih dahulu.[210]

Pada saat itu, mayoritas anggota Majelis Nasional Korea Selatan adalah berpartaikan politik Saenuri yang konservatif, sama seperti partai politik yang mengusung Presiden Lee Myung Bak. Namun, tak semua anggota Majelis Nasional yang konservatif sepaham dengan apa yang diinginkan Lee Myung Bak. Selain itu, tahun 2012 adalah tahun pemilihan umum di Korea Selatan dan dalam suasana politik yang panas itu, tidak mudah bagi partai politik manapun untuk mengabaikan opini publik yang saat itu sedang panas dengan isu *Comfort Women*. Orang tua di Korea Selatan yang konservatif pun juga kembali merasakan kepahitan yang mendalam atas bagaimana mereka diperlakukan oleh tentara Jepang saat masa penjajahan, sehingga mereka juga sangat menentang kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang.[211] Dengan tekanan domestik yang datang dari berbagai arah tersebut, pakta GSOMIA di tahun 2012 pun menjadi gagal ditandatangani.

Sedangkan di tahun 2019 sendiri, mayoritas Majelis Nasional Korea Selatan yang sedang menjabat adalah blok partai politik yang progresif, yang mana hal tersebut berarti bahwa keputusan yang dikeluarkan presiden Moon Jae-in, yang berasal dari *Democratic Party*, akan lebih mudah disetujui oleh Majelis Umum.

---

[210] Seongho Sheen dan Jina Kim, "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact".
[211] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	*Democratic Party (Progressive)*	123
2.	*Saenuri Party (Conservative)*	122
3.	*People's Party (Progressive)*	38
4.	*Justice Party (Progressive)*	6
5.	Independen	11

Tabel 4.1. Majelis Nasional Korea Selatan 2016-2020

Sumber: *Asia Maior*[212]

Dengan melihat pada data bahwa anggota Majelis Nasional yang mayoritas anggotanya merupakan bagian dari kubu progresif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif saat memutuskan mengenai dilanjut atau tidaknya pakta GSOMIA adalah selaras. Berbeda dengan konservatif yang 'Pro-Amerika' dan 'Anti-Korea Utara', karakteristik dari progresif adalah melihat Korea Utara sebagai negara kerabat yang ingin diajak berdamai, memandang Amerika Serikat sebagai perusak potensial dari rekonsiliasi antar-Korea, namun tidak melupakan ancaman nuklir Korea Utara dan tetap menghargai bagaimana hubungan aliansi antara Amerika Serikat-Korea Selatan. [213] Karakteristik tersebut persis menggambarkan bagaimana Moon Jae-in sebagai pemimpin eksekutif di Korea Selatan yang mengusahakan dialog dengan Korea Utara pada tahun 2018. Pada saat dirinya mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA pun, Moon Jae-in tidak langsung mendengarkan. Karena baginya, melanjutkan kerjasama dalam bidang keamanan

[212] Marco Milani, "Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis", halaman 95.
[213] Haesook Chae and Steven Kim, "Conservatives and Progressives in South Korea".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan negara Jepang yang menghambat kegiatan ekspor Korea Selatan dengan beralasankan atas masalah keamanan adalah hal yang tidak logis. Namun dikarenakan adanya banyak pertimbangan, mulai dari komentar Menlu dan Menteri Pertahanannya, kepentingan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman nuklir Korea Utara, dan tekanan dari aliansinya, Moon Jae-in pun akhirnya mengutus staff kepresidenannya untuk mengumumkan bahwa Korea Selatan akan tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang, dengan waktu tersisa 6 jam sebelum pakta tersebut dapat dikatakan resmi berakhir. Keputusan tersebut juga tidak mendapat hambatan dari Majelis Nasional sebagai lembaga legislatif di Korea Selatan karena mayoritas anggota Majelis Nasional sendiri adalah berasal dari partai politik *Democratic* dan berkubukan progresif, sama seperti Moon Jae-in.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa variabel pemerintah juga memiliki peranan dalam menentukan kebijakan luar negeri karena lembaga eksekutif dan legislatif di Korea Selatan sama-sama mendukung keputusan untuk tetap melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang. Hal ini dapat dibuktikan saat setelah pengumuman dari staff kepresidenan Moon Jae-in pada 22 November, juru bicara dari *Democratic Party* (partai politik Moon Jae-in) Lee Haesik mengatakan, "Presiden Moon Jae-in telah memenangkan diplomasi dengan prinsip kepentingan nasional karena perpanjangan pakta GSOMIA akan berkontribusi secara positif dalam memenuhi keamanan nasional".[214]

[214] Lee Seol A, "What is the Reaction of the Parties about the Last Compromise of GSOMIA?", *Hangang Times*, 23 November, 2019, diakses pada 21 Desember 2020, http://www.hg-times.com/news/articleView.html?idxno=210571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan juru bicara dari *People Party* (sekarang *Bareunmirae Party*) Choi Do Ja mengatakan bahwa partainya setuju dengan perpanjangan GSOMIA namun tidak setuju dengan pemerintah yang mengatakan bahwa Korea Selatan bisa memutuskannya lagi kapan saja, karena pakta tersebut bukan saja masalah antara Korea Selatan dan Jepang saja, namun juga berkaitan dengan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat.[215] Juru bicara dari *Justice Party* Yoo Sang Jin mengatakan bahwa partai memaklumi kesulitan pemerintah dalam mempertimbangkan situasi ekonomi, namun partai juga kecewa karena kredibilitas dan konsistensi kebijakan pemerintah menjadi ternodai.[216] Dan juru bicara dari *Saenuri Party* (sekarang *Liberty Korea Party*) Kim Myeong Yeon mengatakan, "Ini sudah tiga bulan semenjak Blue House mengumumkan akan menghentikan GSOMIA dan karena itu opini publik menjadi terpecah dan aliansi AS-Korea Selatan menjadi terganggu. Kini GSOMIA harus terus berlanjut dengan stabil melalui usaha bilateral kedua negara".[217]

Dari konfirmasi teoritik mengenai lima variabel yang penulis jelaskan di atas, kelimanya tidak memiliki peran yang seimbang dalam menentukan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019. Penulis memandang bahwa dari studi kasus ini, variabel individu memiliki pengaruh yang kuat, sedangkan variabel pemerintah memiliki pengaruh paling kurang signifikan dalam menentukan kebijakan. Hal tersebut dikarenakan posisi Moon Jae-in yang berasal dari partai ber-blok progresif

[215] Ibid.
[216] Ibid.
[217] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan peran dari variabel pemerintah yang mayoritas pejabatnya juga berpartaikan progresif mau tidak mau harus mengikuti alur yang ditetapkan Moon Jae-in.

Tidak hanya peran dari Moon Jae-in, variabel sistemik, yang berupa tekanan dari Amerika Serikat juga memiliki pengaruh kuat dalam mempengaruhi keputusan hasil akhir kebijakan luar negeri Korea Selatan. Amerika Serikat, sekutu Korea Selatan sejak masa Perang Dingin, memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Korea Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan bantuan tentara militer Amerika Serikat yang dikirim ke Korea Selatan untuk membantu menjaga zona perbatasan antara kedua negara Korea. Bantuan tentara tersebut bukanlah hal yang *taken for granted*, melainkan Korea Selatan juga perlu berkontribusi dengan membayar dan menyediakan akomodasi bagi tentara militer yang dikirim. Pada awal tahun 2019, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memiliki wacana untuk menaikkan biaya kontribusi yang perlu dibayar oleh Korea Selatan. Di sisi lain saat Korea Selatan mengumumkan untuk akan menarik diri dari pakta GSOMIA pada bulan Agustus 2019, Amerika Serikat melakukan penekanan berulang kali kepada Korea Selatan agar tetap melanjutkan pakta tersebut dengan Jepang. Dari sini, dapat dilihat bahwa Korea Selatan menjadi dihadapkan pada sebuah dilema, dimana dia tidak bisa kalah begitu saja dalam perang dagangnya dengan Jepang, namun dia juga tidak bisa mengabaikan Amerika Serikat yang masih dibutuhkan perannya dalam membantu keamanan nasional Korea Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian dan analisis data yang telah penulis paparkan di bab IV, penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa alasan di balik keputusan Korea Selatan yang tidak jadi menarik diri dari pakta GSOMIA, yaitu: semenanjung Korea yang secara teknis masih berperang hingga sekarang, dinamika ketegangan yang fluktuatif antara Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Selatan dan Jepang sama-sama terancam nuklir Korea Utara, dan hubungan kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sesuai dengan konsep keamanan nasional yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa alasan utama Korea Selatan tetap melanjutkan pakta GSOMIA adalah karena kepentingan keamanan nasional Korea Selatan.

Selain itu, berdasarkan teori kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh James N. Rosenau, ia mengatakan bahwa terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Variabel pertama adalah variabel individu dari pembuat kebijakan, yang mana dalam penelitian ini adalah karakteristik dari Presiden Moon Jaein yang progresif, logis, dan rasional. Variabel kedua adalah peran, yang mana dalam penlitian ini, yang dilihat adalah bagaimana tindakan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Korea Selatan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pembuat kebijakan luar negeri. Variabel ketiga adalah variabel sosial, yang mana dalam penelitian ini, pakta GSOMIA dapat setidaknya membantu mengatasi ketakutan dan ketegangan yang dirasakan masyarakat Korea Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Variabel keempat adalah sistemik, yang mana dalam penelitian ini adalah aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat yang sudah terjalin sejak Perang Dingin membuat Amerika Serikat menjadi salah satu penentu arah kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Sedangkan variabel yang terakhir adalah pemerintah, yang mana dalam penelitian ini, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Korea Selatan saling mendukung untuk melanjutkan pakta GSOMIA dengan Jepang.

B. Saran

Dengan dilanjutkannya pakta GSOMIA tersebut, penulis ingin memberi saran kepada Korea Selatan dan Jepang untuk terus menjalin kerjasama yang baik dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik. Sebab apabila pemutusan pakta intelijen tersebut terulang kembali, itu dapat membahayakan seluruh keamanan di kawasan Asia.

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai kebijakan luar negeri, khusunya terkait teori kebijakan luar negeri oleh Rosenau. Penulis juga berharap agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian kedepannya, terutama penelitian yang berkaitan dengan kajian hubungan internasional yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea.

Penulis juga mengakui bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan sehingga penulis ingin memberi saran pada mahasiswa atau pihak manapun yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk dijadikan pedoman dalam penelitian yang lebih lanjut agar menambah data-data yang lebih banyak dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik pengambilan data triangulasi agar penelitian yang dilakukan akan menjadi lebih sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

Berkowitz, Morton, dan Bock, P.G. *American National Security*. New York: Free Press, 1965.

Beukel, Erik. *The Last Living Fossil Of the Cold War: The Two Koreas, The Dragon And The Eagle: Towards a New Regional Security Complex in East Asia?*. Denmark: Danish Institute for International Studies, 2012. Diakses pada 21 Oktober 2020, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/97059/1/720904978.pdf.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Buzan, Barry. *People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton, Sussex: Department of International Studies University of Warwick, 1983.

Chae, Haesook dan Kim, Steven. *Conservatives and Progressives in South Korea*. Washington: The Washington Quarterly, 2008. Diakses pada 21 Desember 2020. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/twq08autumnchaekim.pdf.

Cibangu, K. S. "Qualitative Research: The Toolkit of Theories in the Social Sciences", dalam *Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management*. Diedit oleh Asunción López-Varela. USA: IntechOpen, 2012.

Cohen, Ira S. dan C. Tuttle, Andrew. *National Security Affairs: A Syllabus*. USA: National Strategy Information Center, 1972.

H, Gibson. *The Road to Foreign Policy*. New York: Doubleday, Doran and Company, 1944. Diakses pada 3 Oktober 2020. https://doi.org/10.2307/1949201.

Hahm, Chaibong. *The Two South Koreas: A House Divided.* Washington: The Washington Quarterly, 2005. Diakses pada 21 Desember 2020. https://doi.org/10.1162/0163660054026515.

Hancock Beverley dkk. *An Introduction to Qualitative Research*. Inggris: The NIHR Research Design Service, 2009. Diakses pada 6 November 2020. https://www.rds-yh.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2013/05/5_Introduction-to-qualitative-research-2009.pdf.

Holsti. *International Politics: A Framework for Analysis.* Diterjemahkan oleh Efin Sudrajat dkk. New Jersey: Prentice Hall, 1987.

Holsti. *Making American Foreign Policy*. New York: Routledge, 2006. Diakses pada 5 November 2020. https://doi.org/10.4324/9780203625446.

Inkeles, A. "Exploring Individual Modernity". New York: Columbia University Press, 1983.

J, Frankel. *The Making of Foreign Policy*. London: Oxford University Press, 1968. Diakses pada 3 Oktober 2020. https://doi.org/10.1177/004711787000300708.

Lee, Chung Min dan Botto, Kathryn. *Overcoming Obstacles to Trilateral U.S.-ROK-Japan Interoperability*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace Publications Department, 2020. Diakses pada 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

September 2020. https://carnegieendowment.org/files/Korea_Net_Assesment_2020.pdf.

Lew, Young Ick. *Brief History of Korea*. (USA: The Korea Society, 2000). Diakses pada 21 Oktober 2020. https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs_GeneralReading/BRIEF%20HISTORY%20OF%20KOREA.pdf.

Manyin, Mark E. *North Korea: A Chronology of Events from 2016 to 2020*. USA: Library of Congress, 2020. Diakses pada 11 Desember 2020. https://www.everycrsreport.com/files/20200505_R46349_6307d94932ea867fd6c287e740681164c6f83bd3.pdf.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 1994.

Padelford dan Lincoln. *The Dynamics of International Politics*. New York: Macmillan Company, 1977. Diakses pada 3 Oktober 2020. https://doi.org/10.1177%2F097492846301900405.

Rosenau, James N. *The Study of World Politics*. New York: Routledge, 2006.

Sheen, Seongho. *Japan-South Korea Relations: Slowly Lifting the Burden of History?*. USA: APCSS, 2003. Diakses pada 15 Desember 2020. https://apcss.org/Publications/Ocasional%20Papers/OPJapanSouthKoreaRelationsSheen(final-10.26.03).pdf.

Torri, Michelguglielmo, dkk. *Asia in 2019: Escalating International Tensions and Authoritarian Involution*. Italia: Viella Libreria Editrice, 2019. Diakses pada 13 Desember 2020, https://www.asiamaior.org/files/AM2019_Korea.pdf.

E-Mail

Brendan M. Howe, pesan *e-mail* kepada penulis, 9 Januari 2021.

Erwin Tan, pesan *e-mail* kepada penulis, 10 Januari 2021.

Jurnal

Buzan, Barry. “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century”, *International Affairs Journal* Vol. 67 No. 3 (1991), https://doi.org/10.2307/2621945.

Lee, Chanwoo. "Future Outlook for the Korean Peninsula Situation". *Special Article* 4 (2018), 49. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/221st_Special_Article_04.pdf

Milani, Marco. “Korean Peninsula 2016: The Never-Ending Crisis”. *The Journal of the Italian Think Tank on Asia*, (2018): 91. Diakses pada 4 Desember 2020. https://www.asiamaior.org/files/04%20Asia%20Maior%202016%20Korean%20Peninsula.pdf.

Polkinghorne. “Language and Meaning: Data Collection in Qualitative Research”. *Journal of Counseling Psychology*, No. 52 (2005), 137–145. doi:10.1037/0022-0167.52.2.137.

Richa Walia. “A Saga of Qualitative Research”. *Social Crimonol* 5 (2015), 3. doi:10.4172/2375-4435.1000124.

Rosenau, James N. "A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence." *International Studies Quarterly* 28, No. 3 (1984): 245-305. Diakses pada 25 Desember 2020. http://www.jstor.org/stable/2600632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sheen, Seongho dan Kim, Jina. "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact". *Asia Pacific Bulletin* No. 176, (2012), 2. https://www.files.ethz.ch/isn/152657/apb176.pdf.

Sik, Kan Den. "Korean Peninsula Problem in the Light of the Latest Events". *Journal of Ukrainian Policymaker Vol*. 3 (2018), 52. https://www.researchgate.net/publication/330148296_Korean_Peninsula_Problem_in_the_Light_of_the_Latest_Events.

Zohrabi, M. "Mixed Method Research: Instruments, Validity, Reliability and Reporting Findings". *Theory and Practice in Language Studies* Vol. 3, No. 2, (2013), 254–262. doi:10.4304/tpls.3.2.254-262.

Media *Online*

"Agreement Between the Government of Japan and the Government of the Republic of Korea on the Protection of Classified Military Information". *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 23 November, 2016. Diakses pada 21 Desember 2020. https://www.mofa.go.jp/files/000205833.pdf.

"Comfort Women: Japan and South Korea Hail Agreement". *BBC*, 28 Desember 2015. Diakses pada 19 Desember, 2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-35190464.

"Decision to End GSOMIA: 48% Keeping VS 38% Canceling". *Realmeter*, 7 November 2019, Diakses 19 Desember 2020. www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-결정-유지-48-vs-철회-38/.

"Defense Minister: GSOMIA Should Be Kept If It Helps Security". *KBS World Radio*, 4 November, 2019. Diakses pada 19 Desember 2020, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149109.

"Demilitarized Zone" *Encyclopedia Britannica*. 4 Februari, 2020. Diakses pada 6 April 2021. https://www.britannica.com/place/demilitarized-zone-Korean-peninsula.

"DMZ - Demilitarized Zone". *Korea Konsult*. Diakses pada 18 November 2020. https://www.koreakonsult.com/Attraction_DMZ_eng.html.

"GFP Power Ranking Index of Nations Since 2005". *Global Fire Power*. Diakses pada 16 Desember 2020. https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp.

"Government of South Korea". *New World Encyclopedia*, 8 Juli, 2017. Diakses pada 21 Desember 2020. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Government_of_South_Korea.

"President Moon Hosts Town Hall Meeting Televised Live". *The Republic of Korea Cheong Wa Dae*, 20 November, 2019. Diakses pada 25 Desember 2020. https://english1.president.go.kr/Media/News/652.

"South Korea Court May Rule on Japan firm Asset Sale in Aug. at Earliest". *Kyodo News*, 4 Juni, 2020. Diakses pada 23 Desember 2020. https://english.kyodonews.net/news/2020/06/1eae94c9f36d-s-korea-court-may-rule-on-japan-firm-asset-sale-in-aug-at-earliest.html?phrase=ruby&words=

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"The President Meets with U.S. Secretary of Defense Mark Esper". *The Republic of Korea Cheong Wa Dae.* 15 November, 2019. Diakses pada 25 Desember 2020. https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/467

"Trump to Meet with South Korea's Moon on April 11 at White House". Reuters, 29 Maret 2019. Diakses pada 2 Juni 2021. https://www.reuters.com/article/uk-northkorea-usa-trump-southkorea-idUKKCN1RA06F.

"Decision of GSOMIA Termination, 48% → 55% VS 38% → 33%". Realmeter, 18 November 2020. Diakses pada 19 Desember 2020. www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-결정-유지-48→55-vs-철회-38→33/

"National Security". *Encyclopedia.* Diakses pada 3 November 2020. https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/military-affairs-nonnaval/national-security.

"North Korea fires long-range rocket despite warnings". *BBC*, 7 Februari, 2016. Diakses pada 5 Desember 2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-35515207.

"North Korea Missile Activity in 2017". *Center for Arms Control and Non-Poliferation*, 30 November, 2017. Diakses pada 8 Desember 2020. https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-north-korea-missile-activity-2017/.

"North Korea Nuclear Crisis: Putin Warns of Planetary Catastrophe". *The Guardian*, 5 September, 2017. Diakses pada 8 Desember 2020. https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/south-korea-minister-redeploying-us-nuclear-weapons-tensions-with-north.

"North Korean Satellite is in Orbit, Says South". *BBC*, 9 Februari, 2016. Diakses pada 5 Desember 2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-35529588.

"Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula (2018.4.27)". *MOFA ROK*, 11 September, 2018. Diakses pada 11 Desember 2020. http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=.

"South Korea Court Approves Seizure of Some of Nippon Steel's Assets". *Reuters*, 8 Januari, 2019. Diakses pada 23 Desember 2020. https://www.reuters.com/article/us-japan-forcedlabour-southkorea-idUSKCN1P21BB.

"South Korea Court Orders Japan's Nippon Steel to Compensate Forced Laborers". *Deutsche Welle*, 30 Oktober, 2018. Diakses pada 23 Desember 2020. https://www.dw.com/en/south-korea-court-orders-japans-nippon-steel-to-compensate-forced-laborers/a-46083413.

"State of the Union: Trump Announces Second North Korea Summit". *BBC News*, 6 Februari, 2019. Diakses pada 13 Desember 2020. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47139969.

"The End of GSOMIA: 55% Good Decision VS 38% Bad Decision". *Realmeter*, 26 Agustus 2019. Diakses pada 19 Desember 2020. www.realmeter.net/한일-지소미아-종료-잘한-결정-55-vs-잘못한-결정-38/?ckattempt=1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ardiansyah, Ferry. "Sekilas Mengenai Perbatasan Dua Korea". *Okezone*, 16 Juni, 2015. Diakses pada 16 Oktober 2020. https://news.okezone.com/read/2015/06/15/18/1165891.

Basu, Titli. "Ketegangan Perdagangan Jepang-Korea Selatan". *Air World Service*, 29 Agustus, 2019. Diakses pada 17 Desember 2020, airworldservice.org/indonesian/2019/08/29/keteganga-perdaganga-jepang-korea-selatan/.

Brazinsky, Gregg. "US-South Korea Relations". *Wilson Center Digital Archive.* Diakses pada 15 Desember 2020. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/resource/modern-korean-history-portal/us-south-korea-relations-1945.

Denmark, Abraham M. "The U.S.-ROK Alliance and Policy Coordination Toward China". *Council on Foreign Relations*, 19 Maret, 2019. Diakses pada 20 Desember 2020. https://www.cfr.org/blog/us-rok-alliance-and-policy-coordination-toward-china.

Gardner, Edward. "South Korea GDP Chart". *Focus Economics*, 1 Juni, 2018. Diakses 16 Desember 2020. https://www.focus-economics.com/countries/korea/news/gdp/the-economy-maintained-its-growth-momentum-in-q1-2018.

Genova, Alexandra. "Two Nations Disputed These Small Islands for 300 Years". *National Geographic*, 14 November, 2018. Diakses pada 19 Desember 2020. https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/asia/south-korea/history-dispute-photos-dodko-rocks-islands/.

Gorkemde. "Normalization of relations between South Korea and Japan". *Shrimp Among Whales*, 16 Agustus, 2016. Diakses pada 15 Desember 2020. https://shrimpamongwhales.com/2016/08/16/normalization-of-relations-between-south-korea-and-japan/.

Ji, Dagyum. "UN Sanctions Committee Allows Seoul to Resupply Northern Military Hotline," *NK News*. Diakses pada 13 Desember 2020. https://www.nknews.org/2018/11/un-sanctions-committee-allows-seoul-to-resupply-northern-military-hotline/.

Jin, Hyunjoo. "Seoul to File WTO Complaint over Japan's 'Discriminatory' Export Curbs". Reuters, 11 September, 2019. Diakses pada 30 Mei 2021, https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-idUSKCN1VW019.

Jung, Damin. "Criticism Grows over US Pressing Seoul on GSOMIA". *The Korea Times*, 8 November, 2019. Diakses pada 20 Desember 2020, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/08/205_278418.html.

Kim, Gwanyong. "Korea-Japan Military Agreement, Defense Ministry: Lack of Efforts to Win Public Support Due to Security Urgency". *Naver News*, 23 November, 2016. Diakses pada 29 November 2020. https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0003683425?sid=001.

Kim, Hyun Chong. "Opening Remarks by Deputy National Security Advisor Hyun Chong Kim at Press Briefing". *The Republic of Korea Cheong Wa Dae*, 23 Agustus, 2019. Diakses pada 25 Desember 2020. https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kim, Tong Hyung. "South Korean President Moon Calls for 4th Summit With Kim Jong Un". The Diplomat, 16 April, 2019. Diakses pada 2 Juni 2021, https://thediplomat.com/2019/04/south-korean-president-moon-calls-for-4th-summit-with-kim-jong-un/.

Kim, You Geun. "Korea Conditionally Suspends Termination of Military Pact with Japan". *Korea.net*, 22 November, 2019. Diakses pada 25 Desember 2020. https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=179694.

Larasati, Rina Ayu. "Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama". *Kompas*, 12 Agustus, 2019. Diakses pada 19 Desember 2020. https://money.kompas.com/read/2019/08/12/210216326/korsel-hapus-jepang-dari-daftar-mitra-dagang-utama.

Lee, Joyce. "Factbox: U.S. and South Korea's Security Arrangement, Cost of Troops". *Reuters*, 13 November 2019. Diakses pada 13 Desember 2020. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-military-factbox-idUSKBN1XN09I.

Lee, Seol A. "What is the Reaction of the Parties about the Last Compromise of GSOMIA?". *Hangang Times*, 23 November, 2019. Diakses pada 21 Desember 2020. http://www.hg-times.com/news/articleView.html?idxno=210571.

Lim, Sojin. "North Korea-US Summit: What Its Failure Means for The Peninsula's Future". *The Conversation*, 28 Februari, 2019. Diakses pada 13 Desember 2020. https://theconversation.com/north-korea-us-summit-what-its-failure-means-for-the-peninsulas-future-112634.

Loanes, Ellen. "These are the 25 Most Powerful Militaries in the World in 2019". *Business Insider*, 27 September, 2019. Diakses pada 16 Desember 2020. https://www.businessinsider.nl/most-powerful-militaries-in-the-world-ranked-2019-9.

Lynch, Ami. "Comfort Women". *Britannica*, 6 Juni, 2019. Diakses pada 19 Desember 2020. https://www.britannica.com/topic/comfort-women.

Panda, Ankit. "Inter-Korean Rail Survey Begins, Ahead of Expected Fourth Kim-Moon Summit". *The Diplomat*, 30 November, 2018. Diakses pada 13 Desember 2020. https://thediplomat.com/2018/12/inter-korean-rail-survey-begins-ahead-of-expected-fourth-kim-moon-summit-in-seoul/.

Park, Jaehan dan Yun, Sangyoung. "Korea and Japan's Military Information Agreement: A Final Touch for the Pivot?". *The Diplomat*, 24 November, 2016. Diakses pada 15 September 2020. thediplomat.com/2016/11/korea-and-japans-military-information-agreement-a-final-touch-for-the-pivot/.

Park, Sangbo, "Implications of the General Security of Military Information Agreement for South Korea", *Stimson*, 16 Desember, 2016. Diakses pada 15 September 2020. https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/.

Pollmann, Mina. "What's Driving Japan's Trade Restrictions on South Korea?". *The Diplomat*, 29 Juli, 2019. Diakses pada 23 Desember 2020, https://thediplomat.com/2019/07/whats-driving-japans-trade-restrictions-on-south-korea/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rich, Motoko dan Wong, Edward. "Under U.S. Pressure, South Korea Stays in Intelligence Pact With Japan". *New York Times*, 22 November, 2019. Diakses pada 18 Desember 2020. https://www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/japan-south-korea-intelligence.html.

Sanger, David E. "North Koreans Say They Tested Nuclear Device". *New York Times*, 9 Oktober, 2006. Diakses pada 29 November 2020. https://www.nytimes.com/2006/10/09/world/asia/09korea.html.

Sekiguchi, Toko. "Osaka Mayor Stirs Anger by Calling Comfort Women Necessary Evil". *Wall Street Journal*, 14 Mei, 2013. Diakses pada 19 Desember 2020. https://www.wsj.com/articles/BL-JRTB-13873.

Shaow, Grace. "South Korea is Scrapping a Security Deal with Japan - Here's Why It Matters", *CNBC*, 23 Agustus, 2019. Diakses pada 15 September 2020. https://www.cnbc.com/2019/08/23/what-is-the-korea-japan-intelligence-sharing-agreement.html.

Sheen, Seong Ho. "South Korea's Overdue Defence Reforms". *East Asia Forum*, 29 Mei, 2019. Diakses pada 16 Desember 2020, https://www.eastasiaforum.org/2019/05/29/south-koreas-overdue-defence-reforms/.

Shin, Hyonhee. "A $5 Nillion Bill and Japan Tensions in Focus as U.S. Defense Heads Visit South Korea". *Reuters*, 13 November 2019. Diakses pada 20 Desember 2020. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-idUSKBN1XN09C.

Shin, Hyonhee. "South Korea-Japan Talks Falter Ahead of Decision on Favored-Trade List". *Reuters*, 1 Agustus, 2019. Diakses pada 18 Desember 2020. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan/south-korea-japan-talks-falter-ahead-of-decision-on-favored-trade-list-idUSKCN1UR39K.

Smith, Josh dan Shin, Hyonhee. "Scrapped Intelligence Pact Draws United States into Deepening South Korea-Japan Dispute". *Reuters*, 29 Agustus, 2019. Diakses pada 19 Desember 2020. https://es.reuters.com/article/idUSKCN1VJ0J6.

Sri Suko, Alchtisar Sedjarah Perang Korea, (akarta: Departen Pertahanan-Keamanan: 1971, dalam Leo Agung, Sejarah Asia Timur 2, Yogyakarta: Penerbit Ombak: 2012.

Trevithick, Joseph. "South Korea Tests Ballistic Missile That Can Hit Anywhere Inside North Korea". *The Drive*, 23 Juni, 2017. Diakses pada 17 Desember 2020. https://www.thedrive.com/the-war-zone/11823/south-korea-tests-ballistic-missile-that-can-hit-anywhere-inside-north-korea.

Work, Clint. "North Korea's Latest Missile Test and South Korea's Response". *The Diplomat*, 2 Desember, 2017. Diakses pada 8 Desember 2020. https://thediplomat.com/2017/12/north-koreas-latest-missile-test-and-south-koreas-response/.

Xuxin. "S.Korea, U.S. to Hold Annual Defense Ministers' Talks Next Week". *Xinhua*, 8 November, 2019. Diakses pada 18 Desember 2020. www.xinhuanet.com/english/2019-11/08/c_138539377.htm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang, Sae Rom. “From Re-implementation of the Controversial Korea-Japan Military Information Agreement to the Final Signing”. *News 1*, 23 November, 2011. Diakses pada 19 Desember 2020. https://n.news.naver.com/article/421/0002409353.

Yeo, Andrew. “South Korea Pulled Out of a Military Intelligence-Sharing Agreement with Japan. That’s a Big Deal”. *The Washington Post*, 27 Agustus, 2019. Diakses pada 15 September 2020, https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/27/south-korea-pulled-out-military-intel-sharing-agreement-with-japan-thats-big-deal/.

Yong, Seong Han. "Moon Jae-In’s Leadership in Depth". *Hankyoreh*, 7 Desember, 2012. Diakses pada 18 Desember 2020. english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/564273.html.

Yonhap. "FM Sees Point in Claims GSOMIA Termination Could Benefit NK, China". *The Korea Herald*, 8 November, 2019. Diakses pada 19 Desember 2020. www.koreaherald.com/view.php?ud=20191108000616.

Yonhap. "Moon Vows to Maintain Security Cooperation with Japan Despite Looming GSOMIA Expiry". *Korea Herald*, 20 November, 2019. Diakses pada 17 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20191120000089.

Yonhap. "S. Korea Renews Call for Japan to Lift Exports Curbs ". *Korea Herald*, 12 Mei, 2020. Diakses pada 17 Desember 2020. www.koreaherald.com/view.php?ud=20200512000810.

Yonhap. "US Expresses 'Strong Concern,' 'Disappointment' at Termination of Seoul-Tokyo Intel Pact". *Korea Rehald*, 23 Agustus, 2019. Diakses pada 20 Desember 2020, www.koreaherald.com/view.php?ud=20190823000106.

Yoo, Kang Moon. "S. Korea Succumbs to US Pressure to Extend GSOMIA". *Hankyoreh*, 25 November, 2019. Diakses pada 20 Desember 2020. english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/918428.html.

Yoon, Sojung. "Weekly Protest in Seoul for 'Comfort Women' Victims Marks 28th Anniversary". *Korea*, 9 Juni, 2020. Diakses pada 19 Desember 2020, https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=181462#none.

Yoshiyuki, Aoki. “What Comes After S. Korea Reverses Decision to End GSOMIA?”. *NHK World* Japan, 25 November, 2019. Diakses pada 15 September 2020, https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/763/#:~:text=South%20Korea%20announced%20last%20week,known%20as%20GSOMIA%2C%20in%20place.

Wawancara

Lee Young Chae, wawancara oleh Korea.net, 31 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id